



**PENGARUH *BI RATE*, JUMLAH UANG BEREDAR DAN DEFISIT  
FISKAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**RIJJALUL AZIMY**  
**NIM.2030402078**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
1446 H / 2025 M**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rijjalul Azimy  
Nim : 2030402078  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Pengaruh BI Rate, Jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal Terhadap Inflasi di Indonesia”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2025

Saya yang Menyatakan,



Rijjalul Azimy  
NIM. 2030402078

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Rijjalul Azimy NIM: 2030402078**, dengan judul **“Pengaruh BI Rate, jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia”** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 3 Januari 2025

**Ketua Program Studi,  
Ekonomi Syariah**

**Pembimbing**



**Dr. Novia Nengsih, MA, Ek, CIFA**  
NIP. 199011042019032008



**Vicy Andriany, M.Ec.Dev**  
NIP. 198709292019032009

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar**

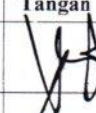
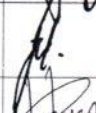


**Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP**  
NIP. 197310072002121001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Rijjalul Azimy Nim. 2030402078**, dengan judul: **“Pengaruh BI Rate, Jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal Terhadap Inflasi di Indonesia”** telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada Rabu, 22 Januari 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Vicy Andriany, M. Ec. Dev NIP. 198709292019032009	Ketua / Pembimbing		16/1/25
2.	Mohammad Aliman Shahmi, M.E NIP. 199308292022031002	Penguji I		01/02/25 /2
3.	Husni Shabri, M.Si NIP. 193703132023211008	Penguji II		17/02/2025

Batusangkar, Februari 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus  
Batusangkar



**Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP**  
NIP. 19731007 200212 1 001

## ABSTRAK

**Rijjalul Azimy, NIM 2030402078, Judul Skripsi: “Pengaruh *Bi Rate*, Jumlah Uang Beredar Dan Defisit Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia”.** Program Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah inflasi tahun 2012-2015 mengalami kenaikan di Indonesia dan pada tahun 2022 inflasi kembali meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Bi Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal terhadap inflasi di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan metode penelitian adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan World Bank data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Bi Rate* dan defisit fiskal berpengaruh terhadap inflasi, sedangkan jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap Inflasi. Secara simultan variabel *Bi Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan variabel Inflasi.

***Kata Kunci : BI Rate, Jumlah Uang Beredar, Defisit fiskal dan Inflasi***

## **ABSTRACT**

**Rijjalul Azimy, NIM 2030402078, Thesis Title: "The Effect of BI Rate, Money Supply and Fiscal Deficit on Inflation in Indonesia". Islamic Economics Undergraduate Program, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.**

*The problem in this study is that inflation in 2012-2015 increased in Indonesia and in 2022 inflation increased again. The purpose of this study is to determine the effect of the BI rate, the amount of money in circulation and the fiscal deficit on inflation in Indonesia.*

*This type of research is causal associative research with a quantitative research method. The data sources used in this study are secondary data obtained from Bank Indonesia and World Bank data. The data analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis processed using SPSS 25.*

*The results of the study indicate that partially the Bi Rate and fiscal deficit variables affect inflation, while the amount of money in circulation does not affect inflation. Simultaneously, the Bi Rate variables, the amount of money in circulation and the fiscal deficit together have a significant effect on the Inflation variable.*

**Keywords : BI Rate, Money Supply, Fiscal Deficit and Inflation**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Dan Luaran Penelitian .....	12
G. Definisi Operasional .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Landasan Teori .....	14
1. Inflasi .....	14
2. BI <i>Rate</i> (Bunga Bank / Suku Bunga ).....	28
3. Jumlah Uang Beredar.....	40
4. Defisit Fiskal.....	49
B. Penelitian Yang Relevan .....	57
C. Kerangka Berpikir .....	61
D. Hipotesis .....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Jenis Penelitian .....	62
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	62

C. Sumber Data .....	63
D. Teknik Pengumpulan Data .....	63
E. Teknis Analisis Data.....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	68
B. Hasil Penelitian.....	71
1. Uji Asumsi Klasik .....	71
2. Uji Hipotesis.....	75
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	77
4. Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	78
C. Pembahasan Penelitian .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	62
Tabel 4. 1 Uji Normalitas.....	72
Tabel 4. 2 Uji Heteroskedastisitas.....	73
Tabel 4. 3 Uji Multikolinearitas .....	73
Tabel 4. 4 Auto Korelasi .....	74
Tabel 4. 5 Hasil Uji T.....	75
Tabel 4. 6 Hasil Uji F.....	76
Tabel 4. 7 Uji Regresi Linear Berganda.....	77
Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinan .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	61
Gambar 4. 1 Peta Kondisi Geografis indonesia .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Struktur ekonomi yang terdapat pada negara-negara berkembang biasanya mengikuti pola agraris (pola kehidupan pertanian) sehingga sangat rentan terhadap gangguan stabilitas kegiatan perekonomian. Dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia sering mengalami gejolak. Perekonomian selalu menjadi hal yang paling penting untuk dikhawatirkan, karena jika ekonomi tidak stabil, masalah seperti pengangguran yang tinggi, rendahnya ekspansi ekonomi, dan tingkat inflasi terbilang tinggi.

Hampir semua negara, baik negara maju maupun non-industri, mengalami keamanan dan masalah dengan pembangunan keuangan. Masalah-masalah ini selalu hadir di Indonesia, salah satu negara berkembang yang ekonominya sangat bergantung pada ekonomi global dan sistem moneter. Perekonomian Indonesia dengan perekonomian global telah mengiringi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat buruk selama beberapa dekade terakhir (Yanti, 2022).

Salah satu masalah ekonomi yang menjadi perhatian oleh para pemikir ekonomi yaitu inflasi karena inflasi digunakan untuk mengukur atau melihat stabilitas perekonomian pada suatu negara. Salah satu faktor yang mengakibatkan gejolak perekonomian yang penting dan ditakuti oleh pemerintah yaitu inflasi, karena dapat berpengaruh buruk pada struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan (Ningsih, 2019).

Inflasi dapat diartikan sebagai kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan terjadi secara terus menerus. Inflasi merupakan sebuah fenomena yang selalu ada disetiap negara dan dijadikan sebagai indikator untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada kenaikan tingkat kemiskinan (Fahrika, 2020)

Secara umum inflasi menyebabkan timbulnya sejumlah biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pertama, inflasi menimbulkan dampak negatif pada distribusi pendapatan. Masyarakat golongan bawah dan berpendapatan tetap akan menanggung beban inflasi dengan turunnya daya beli mereka. Sebaliknya, masyarakat menengah dan atas yang memiliki aset-aset finansial seperti tabungan dan deposito dapat melindungi kekayaannya dari inflasi, sehingga daya beli mereka relatif tetap. Kedua, inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satu kebijakan dalam pengendalian inflasi adalah kebijakan moneter. Untuk kebijakan moneter, pada umumnya kebijakan yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter untuk mempengaruhi variabel moneter, jumlah uang beredar, suku bunga SBI dan nilai tukar.

Pada umumnya kebijakan moneter adalah dicapainya keseimbangan intern (*internal balance*) dan keseimbangan ekstern (*external balance*). Keseimbangan internal biasanya ditunjukkan dengan terciptanya keseimbangan kerja yang tinggi, tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dipertahankan laju inflasi yang rendah. Disisi lain keseimbangan internal biasanya ditunjukkan dengan neraca pembayaran yang seimbang (Mahendra, 2016)

Di Indonesia tepatnya pada era demokrasi dipimpin Presiden Indonesia Ir. Soekarno cetak uang rupiah hingga inflasi pada saat itu mencapai 0,1% sehingga pada tanggal 13 Desember 1995 pemerintah melakukan penyederhanaan nilai rupiah dari 1000 rupiah menjadi 1 rupiah. (Susmiati, 2021).

Secara umum inflasi menyebabkan timbulnya sejumlah biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pertama, inflasi menimbulkan dampak negatif pada distribusi pendapatan. Masyarakat golongan bawah dan berpendapatan tetap akan menanggung beban inflasi dengan turunnya daya beli mereka. Sebaliknya, masyarakat menengah dan atas yang memiliki aset-aset finansial seperti tabungan dan deposito dapat melindungi kekayaannya dari inflasi, sehingga daya beli mereka relatif tetap. Salah satu kebijakan

dalam pengendalian inflasi adalah kebijakan moneter. Untuk kebijakan moneter, pada umumnya kebijakan yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter untuk mempengaruhi variabel moneter, jumlah uang beredar, suku bunga SBI dan nilai tukar. Pada umumnya kebijakan moneter adalah dicapainya keseimbangan intern dan keseimbangan ekstern (Perlambang, 2010).

Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Pada kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang seringkali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal ini mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil risiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang. Kebanyakan ekonom berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonom berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi, akan jatuh dengan cepat karena persaingan (Huda, 2008).

Efek buruk yang dapat ditimbulkan dari inflasi adalah penurunan daya beli masyarakat. Peningkatan inflasi secara terus menerus bisa mendorong daya beli masyarakat yang tercermin dari pengurangan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga untuk menjaga daya beli masyarakat maka inflasi harus berada pada tingkat yang stabil. Inflasi sangat identik dengan tingkat harga, jika harga naik maka permintaan akan barang dan jasa akan turun. Artinya, kenaikan inflasi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menghambat konsumsi. Peningkatan pada inflasi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menghambat roda konsumsi (Sari, 2023).

Faktor yang berpengaruh pada naikturunnya laju inflasi antara lain yaitu suku bunga acuan atau bisa disebut juga dengan BI Rate, karena *BI Rate* merupakan sinyal bagi perbankan untuk menentukan tingkat suku bunga seperti suku bunga deposito, suku bunga kredit dan suku bunga tabungan. Apabila tekanan inflasi meningkat maka Bank Indonesia dapat memberikan respon dengan melakukan peningkatan pada suku bunga BI Rate (Aziz, 2023).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi inflasi adalah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*), hal ini yang didasari oleh *BI Rate* merupakan faktor fundamental makroekonomi yang mempengaruhi perubahan pada tingkat inflasi secara signifikan di Indonesia. Otoritas moneter akan menaikkan *BI Rate* untuk mempengaruhi suku bunga perbankan yaitu suku bunga tabungan dan kredit (Sari, 2023).

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah persentase imbalan dari uang yang telah dipinjamkan atau diinvestasikan untuk dibayarkan di masa depan (Mankiw, 2018).

Bank Indonesia mengatakan bahwa suku bunga acuan Bank Indonesia biasa di sebut dengan *BI Rate* adalah sebuah kebijakan suku bunga patokan dengan tenor satu bulan yang dikeluarkan dalam mencerminkan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia sejak 1970 dan diumumkan ke publik. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur tingkat suku bunga acuan yang akan dipakai dalam perekonomian dalam jangka waktu tertentu. *BI Rate* merupakan suku bunga yang ditetapkan oleh BI sebagai upaya mencapai ekspektasi inflasi. Sebagai suku bunga acuan, *BI Rate* menjadi acuan dalam pergerakan suku bunga di pasar keuangan. Peningkatan ataupun penurunan *BI Rate* diharapkan dapat menstabilkan pergerakan peredaran uang di masyarakat.

Berfluktuasinya tingkat inflasi di Indonesia dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, mengakibatkan semakin sulitnya pengendalian inflasi, sehingga dalam pengendaliannya pemerintah dan Bank Indonesia harus mengetahui faktor-faktor penyebab inflasi, agar memudahkan dalam mengambil langkah lebih lanjut. Inflasi di Indonesia bukan saja merupakan fenomena jangka pendek, seperti dalam teori kuantitas dan teori inflasi Keynes, tetapi juga merupakan fenomena jangka panjang (Baasir, 2003).

Menurut pandangan klasik tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mengurangi tingkat konsumsi. Klasik menjelaskan bahwa suku bunga merupakan fungsi dari tabungan. Semakin tinggi suku bunga maka keinginan untuk menabung akan tinggi. Keinginan menabung yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat, sehingga pada akhirnya laju inflasi juga akan ikut menurun (Nopirin, 2007).

Salah satu cara melihat ekspektasi inflasi di dalam suku bunga nominal adalah dengan menggunakan *yield curve*. *Yield Curve* merupakan hubungan antara pendapatan atau suku bunga (*rate of return*) dengan jangka waktu (*term of maturity*). Pada dasarnya bentuk *yield curve* memiliki keterkaitan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. secara konvensional, transmisi kebijakan moneter terjadi dari suku bunga jangka pendek yang dikendalikan bank sentral ke suku bunga jangka panjang. Suku bunga jangka panjang pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan agregat. Bank sentral di negara yang menggunakan inflasi sebagai sasaran akhir, dapat menggunakan suku bunga jangka panjang untuk menguji efektifitas pencapaian dalam mengendalikan inflasi yang rendah. beberapa penelitian empiris di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya juga telah menemukan hubungan yang dekat antara *slope* jangka waktu suku bunga di atas satu tahun dengan proyeksi perubahan inflasi dalam jangka menengah. Kerangka teori yang berkaitan dengan ini adalah "*Hipotesa Fisher*" yang menyatakan suku bunga nominal memiliki hubungan *one for one* dengan

ekspektasi inflasi. Pada umumnya, di negara-negara maju ekspektasi inflasi dilihat dengan menggunakan suku bunga obligasi. Namun demikian, *structure of interest rate* di negara-negara berkembang menggunakan suku bunga deposito untuk penelitiannya. Dapat tidaknya suku bunga di Indonesia digunakan sebagai salah satu indikator ekspektasi inflasi, belum pernah ada yang yang membuktikannya secara empiris. (Goodfriend. 1998).

Selain suku bunga, jumlah uang beredar juga termasuk dalam faktor yang memengaruhi inflasi. Apabila timbulnya penambahan kapasitas terhadap jumlah uang beredar maka akan menyebabkan inflasi. Bertambahnya kapasitas uang yang memicu peningkatan terhadap barang dan jasa akan menyebabkan inflasi. Namun dalam teori Keynes mengungkapkan bahwa bukan hanya jumlah uang saja yang menyebabkan inflasi, inflasi juga terjadi apabila pelaku ekonomi ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomi yang dimilikinya atau terjadinya ketidakseimbangan ketika permintaan masyarakat melebihi jumlah barang atau jasa yang tersedia sehingga terjadinya kenaikan harga atau dapat disebut dengan *inflationary gap* (Kalalo. 2016).

Jumlah uang yang beredar di masyarakat mempunyai dampak signifikan terhadap tingkat inflasi karena meningkatkan kemungkinan harga barang dan jasa akan naik. Jumlah koin, uang kuasi, dan uang kertas yang telah dicetak oleh bank sentral serta sudah beredar saat ini dikenal sebagai uang beredar, karena faktanya semua uang dapat dijadikan uang tunai, yang memiliki tujuan sama dengan mata uang (Chandra & Wahyuningsih, 2021).

Berdasarkan keterkaitan antara jumlah uang beredar dengan nilai tukar, peningkatan belanja konsumen, terutama untuk produk impor, akan berdampak pada jumlah uang beredar jika rupiah meningkat. *BI Rate* berdampak pada inflasi karena perubahan suku bunga dapat berdampak pada permintaan masyarakat akan kredit dan investasi, yang keduanya dapat berdampak pada harga barang dan jasa (Ferdiansyah, 2011).

Bank Indonesia mendefinisikan uang atau uang beredar dalam arti sempit dan luas. Uang beredar dalam pengertian yang lebih terbatas atau

disebut sebagai M1, melibatkan unsur-unsur uang yang secara langsung dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari termasuk kartal dan giral yang dimiliki oleh masyarakat umum. Uang giral dalam konteks M1 mencakup saldo rekening giro individu dan perusahaan di bank (saldo rekening koran di bank lain atau bank sentral serta saldo pemerintah tidak termasuk dalam kategori uang giral). Pengertian uang beredar yang lebih luas atau M2, juga mencakup deposito berjangka dan saldo simpanan di bank. Adapun definisi uang beredar paling inklusif yaitu M3, mencakup seluruh deposito berjangka dan saldo tabungan penduduk di bank dan lembaga keuangan non bank termasuk yang berdenominasi dalam mata uang asing (Manihuruk, 2023).

Perubahan JUB yang tidak terkendali bisa mengakibatkan naiknya harga yang tinggi memberikan dampak rusaknya pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan masalah lain. Sebaliknya, jika terjadi perubahan jumlah uang beredar yang terlalu rendah, perekonomian akan mengalami kelesuan apabila terjadi dalam jangka panjang akan merusak kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian JUB memiliki peran penting bagi perekonomian. Pengendalian JUB adalah salah satu dari kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga stabilitas moneter dan mendorong kegiatan ekonomi. Menurut teori kuantitas, naiknya inflasi terjadi apabila ada penambahan laju JUB. Kejadian seperti gagalnya panen hanya menyebabkan naiknya harga untuk sementara waktu bukan inflasi. Tingkat pertumbuhan dalam kuantitas uang menentukan tingkat inflasi. Teori yang dikembangkan oleh Irving Fisher ini menjelaskan bahwa mekanisme moneter bersifat secara langsung, laju JUB merupakan penyebab utama inflasi (Iffatunnisa, 2024).

Mengingat perekonomian Indonesia yang terbuka dan terletak di pusat perekonomian global, faktor eksternal turut mempengaruhi tingkat inflasi negara tersebut. Implikasi dari keadaan tersebut yakni terdapat gejala ekonomi dari luar negeri yang berdampak pada perekonomian dalam negeri. Tingkat inflasi yang tinggi harus dihindarkan dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia guna menjaga momentum pertumbuhan yang sehat dan gairah dunia usaha (Susmiati, 2021).

Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat yang dimiliki pemerintah untuk memengaruhi perekonomian. Pengeluaran pemerintah memiliki multipler sehingga meningkatkan pengeluaran pemerintah yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pendapatan pemerintah tidak selalu mencukupi untuk membiayai peningkatan pengeluaran sehingga terjadi defisit fiskal. Jika defisit memacu pertumbuhan ekonomi, maka pada periode berikutnya pemerintah akan mengalami kenaikan pendapatan yang bisa digunakan untuk menutup defisit yang telah terjadi (Mankiw, 2008).

Kebijakan Fiskal dan Moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menghindari dari suatu masalah ekonomi yang akan terjadi bagi suatu negara. Kebijakan Fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menghindari dari suatu masalah ekonomi yang akan terjadi bagi suatu negara. Salah satu cara untuk menjaga perekonomian suatu negara yakni dengan menjaga stabilitas ekonominya, stabilitas ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana perekonomian suatu negara berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjelaskan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu distribusi, alokasi dan stabilisasi, serta secara spesifik menyebutkan bahwa defisit fiskal dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (penjelasan Pasal 12 Ayat 3). Sebagai turunan dan "petunjuk teknis" pelaksanaan amanat undang-undang tersebut, pemerintah membuat dua peraturan penunjang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Azimi, 2021).

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam

jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Dalam pengelolaan stabilitas makro ekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter. Transmisi kebijakan fiskal ke inflasi dapat melalui permintaan agregat, spillover public wages ke sektor swasta, serta pengaruh pajak terhadap biaya marginal dan konsumsi swasta. Selain itu, kebijakan fiskal berdampak terhadap inflasi melalui ekspektasi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk membayar utang publiknya. (Amin, 2012)

Dampak kebijakan fiskal dikelompokkan menjadi dua yaitu dampak terhadap sisi permintaan (*demand side effect*) dan dampak terhadap sisi penawaran (*supply side effect*). Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan *supply side* dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dan karena itu dampaknya lebih bersifat jangka panjang. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian melalui pendekatan permintaan agregat diterangkan melalui pendekatan Keynes, dimana terdapat peran pemerintah di dalam pengendalian perekonomian suatu negara.

Defisit fiskal yang tidak berkelanjutan pada tingkat bunga pasar sehingga dampak berikutnya adalah kenaikan ekspektasi inflasi dan pada akhirnya berpengaruh kepada tingkat inflasi itu sendiri. Cara membiayai defisit anggaran yang tinggi salah satunya dengan melakukan pencetakan uang (*printing money*), namun pencetakan uang (*printing money*), pada tingkat yang melebihi permintaan menciptakan kelebihan saldo kas atau uang beredar ditangan masyarakat, dan hal ini dapat juga menimbulkan inflasi yang tinggi, sehingga pencetakan uang (*printing money*) tidak diperbolehkan dalam membiayai defisit anggaran. Dalam lingkungan inflasi tinggi, belanja fiskalakan meningkatkan ekspektasi inflasi dan biayapinjaman, yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Dalam ketidakpastian tersebut efek kepercayaan cenderung menjadi lebih penting dan bagaimana cara

merespon akansangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan kredibilitasnya (Assa, 2020).

Dalam dinamika ekonomi mikro, kebijakan fiskal memainkan peran sentral dalam mengelola tingkat inflasi. Kebijakan fiskal yang melibatkan penggunaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perlu dipahami bagaimana perubahan kebijakan fiskal dapat meningkatkan tingkat inflasi. Dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan ekonomi yang dinamis menuntut pemahaman mendalam tentang cara kebijakan fiskal dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi.

Kebijakan defisit fiskal yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi, sebaliknya perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi juga memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan terintegrasi dengan perekonomian dunia memberikan implikasi penting bagi para pelaku ekonomi terutama dalam pengambilan kebijakan makroekonomi. Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter melalui koordinasi yang baik akan memberikan sinyal positif bagi pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap output dan terjadinya inflasi ternyata sangat besar dampaknya akibat virus covid 19 pada perekonomian di Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan strategi yang dapat membantu dalam perekonomian yang terjadi saat ini. (Haryati, 2020).

Hal ini mendorong peneliti untuk mendalami lebih lanjut untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Bi Rate*, Jumlah Uang Beredar Dan Defisit Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut :

1. *Bi Rate* pada tahun 1998 mengalami penurunan, inflasi melonjak tinggi.

2. Jumlah uang beredar dari tahun 1994-1998 meningkat, namun inflasi naik turun tahun 1994-1998.
3. Defisit fiskal meningkat drastis, namun inflasi fluktuatif pada sumber pembiayaannya.
4. Tingkat suku bunga *BI Rate* tinggi, inflasi juga mengalami kenaikan.
5. Jumlah uang beredar meningkat mengalami peningkatan yang cenderung stabil yang menyebabkan inflasi tinggi.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh *BI Rate* terhadap tingkat inflasi di Indonesia.
2. Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap inflasi di Indonesia.
3. Pengaruh Defisit Fiskal terhadap inflasi di Indonesia.
4. Pengaruh *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal secara simultan terhadap inflasi di Indonesia.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *BI Rate* terhadap inflasi di Indonesia tahun 1994-2023 ?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap inflasi di Indonesia tahun 1994-2023 ?
3. Bagaimana pengaruh Defisit Fiskal terhadap inflasi di Indonesia tahun 1994-2023 ?
4. Bagaimana pengaruh *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal secara simultan terhadap inflasi di Indonesia tahun 1994-2023 ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat di peroleh tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *BI Rate* berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia tahun 1994-2023.
2. Untuk mengetahui jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia tahun 1994-2023.
3. Untuk mengetahui defisit fiskal berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia tahun 1994-2023.
4. Untuk mengetahui *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia tahun 1994-2023.

#### **F. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar, dan Defisit Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi peneliti sendiri dan mengembangkan pengetahuan tentang pengaruh *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar, dan Defisit Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia.

2. Luaran Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan pada perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan berpotensi untuk dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah.

#### **G. Definisi Operasional**

Adapun yang penulis maksud dengan definisi operasional ini adalah penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas dan satu

variabel terikat, adapun tiga variabel bebas adalah *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar, Defisit Fiskal dan variabel terikat adalah Inflasi.

Inflasi adalah keadaan dimana terjadi peningkatan harga-harga pada umumnya atau terjadinya penurunan nilai uang. Inflasi terjadi karena semakin meningkatnya jumlah uang beredar dalam suatu masyarakat (Manulang, 1980). Inflasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Inflasi yang terjadi di Indonesia yang diperoleh dari World Bank dari tahun 1994-2023.

*BI Rate* merupakan suku bunga acuan bank yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Perubahan *BI Rate* dapat mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. (Alvyonita & Hidayat, 2017). Teori yang digunakan yaitu Teori Transmisi Mekanisme Moneter. *BI Rate* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BI Rate (suku bunga acuan Bank Indonesia) yang terjadi di Indonesia yang diperoleh dari World Bank dari tahun 1994-2023.

Jumlah Uang Beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada ditangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) adalah jumlah uang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. Sedangkan dalam arti luas, M2 meliputi M1 serta uang kuasi (mencakup tabungan deposito berjangka, rekening valas, serta giro dalam valuta asing) dan surat berjangka yang diterbitkan oleh sistem moneter dan teori yang digunakan adalah teori ekonomi klasik. Jumlah Uang Beredar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Jumlah Uang Beredar yang terjadi di Indonesia yang diperoleh dari World Bank dari tahun 1994-2023.

Defisit Fiskal adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Teori Ekspektasi Inflasi, Defisit fiskal yang persisten dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Defisit Fiskal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Defisit Fiskal APBN di Indonesia yang diperoleh dari situs web Bank Indonesia dari tahun 1994-2023.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Inflasi**

###### **a. Pengertian Inflasi**

Menurut Frank (2015), inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga yang terjadi secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Inflasi terjadi ketika terjadi kenaikan harga pada barang secara menyeluruh. Dengan kata lain, apabila harga naik pada satu atau beberapa item dan jenis barang saja, maka hal tersebut belum memenuhi kriteria inflasi. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu keadaan yang menggambarkan harga produk (baik barang maupun jasa) menurun secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. (Siswantoro,2024).

Terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi. Pertama adalah “kenaikan harga secara umum” dan yang kedua adalah “terus-menerus”. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi dalam suatu perekonomian. (Suseno, 2009:2)

Inflasi adalah suatu keadaan yang dimana mengakibatkan proses naiknya harga secara umum dan terus-menerus. Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu

negara ke negara lain. Ada kalanya tingkat inflasi adalah rendah-yaitu mencapai di bawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4–10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun. (Sadono, 2016:14).

Inflasi adalah suatu topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan dalam kehidupan ekonomi, karena memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga dan distribusi pendapatan suatu negara. Sebagai pelaku ekonomi, memperhatikan naik turunnya harga-harga barang di pasaran sangat diperlukan. Inflasi akan menentukan harga barang-barang yang ada di pasar, dimana barang-barang tersebut yang selalu dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Tingkat Inflasi harus dijaga pada angka yang normal agar tidak terjadi suatu gejolak perekonomian. Akan jadi bahaya apabila Inflasi tidak bisa dikendalikan, untuk itu perlu dilakukan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu Inflasi.

Berhasil atau tidaknya negara dalam mengatasi permasalahan ekonomi dapat ditinjau dari ekonomi makro dan ekonomi mikro negara tersebut. Ekonomi makro adalah ilmu mengenai aktivitas perekonomian dalam suatu negara. Inflasi merupakan salah satu dari indikator ekonomi makro yang berfungsi sebagai alat ukur stabilitas perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang secara umum dan dalam waktu yang berkelanjutan. Kenaikan harga yang terjadi dalam jangka waktu pendek atau sementara tidak dapat diartikan sebagai inflasi, karena rentang waktu inflasi paling pendek adalah dalam satu bulan atau 30 hari. Selain itu, kenaikan harga yang terjadi pada satu atau beberapa barang saja juga tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan harga barang tersebut mempengaruhi kenaikan harga barang lain (Kalsum, 2017).

Inflasi merupakan indikator penting pada perekonomian yang memperlihatkan kenaikan nilai suatu barang dan jasa pada ekonomi. Inflasi termasuk dalam indikator makroekonomi yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Mengendalikan inflasi di Indonesia menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Untuk mengendalikan inflasi, terdapat dua kebijakan yang sering diterapkan, yaitu pengaturan tingkat suku bunga dan pengelolaan jumlah uang beredar. Inflasi adalah peningkatan tingkat biaya secara luas, sedangkan arus inflasi merujuk pada tingkat perubahan nilai tersebut. Inflasi dapat dipahami sebagai tahap peningkatan nilai barang secara luas yang terjadi terus-menerus pada periode yang lama, yang membuat penurunan nilai riil mata uang. Perekonomian akan semakin memburuk jika inflasi terus berlanjut, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah meliputi kebijakan moneter juga kebijakan fiskal (Natsir 2014).

Bank Indonesia berperan penting menjaga stabilisasi inflasi agar tetap rendah dan stabil sebagai indikator perekonomian nasional yang dikelola dengan baik. Menurut perspektif masyarakat maupun dunia usaha, inflasi menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Maka dari itu, inflasi berperan untuk membantu pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat (Utari, 2016).

Pengertian Inflasi islam tidak berbeda dengan Inflasi konvensional. Inflasi mempunyai pengertian sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Sehingga, Inflasi merupakan gejala yang terjadi karena kenaikan harga barang yang secara sengaja maupun secara alami dan tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi di seluruh penjuru negara bahkan dunia. Kenaikan harga ini berlangsung secara terus menerus atau lama dan bisa jadi semakin tinggi jika tidak ditemukan solusi pemecahan

masalah yang menyebabkan terjadinya Inflasi tersebut. (Adiwarman, 2004)

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Dengan kata lain, Inflasi juga merupakan suatu keadaan menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

#### **b. Teori Inflasi**

Terdapat tiga teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dan proses terjadinya inflasi diantaranya sebagai berikut :

##### 1) Teori Neoklasik

Menurut teori ini ada dua faktor penyebab terjadinya inflasi, yaitu:

##### a) Jumlah Uang Beredar

Jumlah Uang Beredar Pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi dijelaskan melalui persamaan Kuantitas Uang yang dikembangkan oleh Irving Fisher (1911), sebagai berikut:  $MV = PT$  dimana: M = jumlah uang beredar (*money*); V = kecepatan peredaran uang (*volocity of money*); P = tingkat harga (*price*); dan T = volume transaksi (*transaction*).

T dianggap tetap karena selalu berada dalam *fullemployment*. Demikian pula V, selama tidak ada perubahan dalam kebiasaan melakukan pembayaran. Sehingga, hanya M dan P yang bisa berubah, dimana P akan naik (inflasi) jika M naik.

##### b) Ekspektasi harapan masyarakat terhadap kenaikan harga-harga (inflasi) di waktu mendatang.

Kemungkinannya adalah sebagai berikut:

- (1) Jika harga diespektasi tidak naik maka tambahan JUB yang diterima masyarakat tidak dibelanjakan sehingga tidak menimbulkan kenaikan permintaan agregat dan harga-harga (tidak terjadi inflasi).

- (2) Jika harga diekspektasi akan naik maka tambahan JUB yang diterima masyarakat akan dibelanjakan sehingga menimbulkan kenaikan permintaan agregat dan harga-harga (terjadi inflasi).
- (3) Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap nilai uang maka masyarakat enggan menyimpan uang, seberapa uang yang ada akan dibelanjakan, sehingga menimbulkan hiperinflasi.

## 2) Teori Keynes

Keynes berpendapat bahwa inflasi dapat disebabkan karena ketidakseimbangan antara permintaan masyarakat terhadap barang-barang dangangan dengan penawaran atau persediaan, dimana permintaan akan lebih meningkat dibandingkan dengan barang yang ada, sehingga terdapat *gap* atau jurang yang disebut *inflationary gap*. Menurut teori ini salah satu penyebab terjadinya inflasi yaitu ada sebagian masyarakat ingin hidup diluar batas perekonominya, yang dapat memicu terjadinya inflasi.

## 3) Teori Strukturalis

Disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena menekankan faktor struktural sebagai akar inflasi yang terjadi di negara sedang berkembang. Faktor tersebut diantaranya :

- a) Penerimaan ekspor yang rendah mengakibatkan kelangkaan valuta sehingga menghambat impor bahan baku dan barang modal. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, industri substitusi impor dikembangkan. Namun biaya produksinya mahal sehingga harga jual produknya juga ikut mahal (inflasi).
- b) Pertumbuhan pasok bahan pangan yang lambat tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya sehingga harganya relatif mahal. Para pekerja menuntut kenaikan upah sehingga

menimbulkan kenaikan biaya produksi dan kenaikan harga barang-barang (inflasi).

### c. Jenis Jenis Inflasi

#### 1) Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut : (Nopirin, 2014:27)

a) Inflasi yang merayap (*creeping inflation*) Inflasi yang merayap ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun), kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

b) Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi.

c) Inflasi tinggi (*hyper inflation*) Inflasi tinggi yang merupakan paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan menyimpan uang karena nilai uang merosot dengan tajam sehingga masyarakat lebih memilih untuk menukarkannya dengan barang.

#### 2) Jenis Inflasi Menurut Sebabnya

Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil, perlu terlebih dahulu mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi antara lain : (Nopirin, 2014:28)

a) Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*)

Inflasi tarikan permintaan bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*), sedangkan produksi telah pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan

kerja penuh, kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga dapat juga menaikkan hasil produksi. (Nopirin, 2014:28)

- b) Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*) Inflasi desakan biaya biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunya produk. Jadi ini berarti inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini biasanya dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*). (Nopirin, 2014,30)

#### **d. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia**

Mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah OPT atau yang lain, dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Tindakan itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham maupun sekuritas lainnya. Sementara itu, di sektor ekonomi riil kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter

Dalam kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan "*black box*". Hal ini terutama karena transmisi dimaksud banyak dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sebagai berikut :

- 1) Perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya.
- 2) Lamanya jangka waktu sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai.

3) Terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan.

Perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta pelaku ekonomi, jelas akan berpengaruh pada interaksi yang dilakukannya dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, dan karenanya akan membawa perubahan pula pada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Bahkan dalam banyak hal, karena menyangkut perubahan perilaku dan ekspektasi, mekanisme transmisi kebijakan moneter dimaksud diliputi oleh ketidakpastian dan relatif sulit diprediksi. Setiap perubahan kebijakan bank sentral akan diikuti atau telah diantisipasi dengan perubahan perilaku perbankan, sektor keuangan dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. (Sari, 2023).

Berdasarkan konsep dasar ekonomi, inflasi lebih dominan terjadi ketika masyarakat memegang banyak uang dan tidak diimbangi oleh penawaran barang dan jasa (Mbongo, 2014:19). Pasokan uang yang terus bertambah ini menyebabkan harga barang dan jasa meningkat terutama jika pertumbuhan *output* telah mencapai kapasitas penuh, sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan pada tingkat harga bukan hanya dikarenakan barang dan jasa lebih langka dari sebelumnya, tapi karena jumlah uang yang melimpah sehingga menurunkan nilai uang itu sendiri (Sari, 2023).

#### **e. Transmisi Moneter dan Proses Perputaran Uang**

Pemahaman mengenai pengertian dan kompleksitas transmisi kebijakan moneter barangkali akan lebih jelas apabila ditempatkan pada proses perputaran uang dalam perekonomian. Dalam kaitan ini, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lain, dan pelaku ekonomi di sektor riil melalui dua tahap proses perputaran uang. Pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara

bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil. (Solikin, 2002)

#### **f. Dampak Dari Inflasi**

Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. Namun, penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi dampaknya tidak akan sama terhadap seluruh masyarakat.

Kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap, misalnya, pegawai negeri, adalah kelompok masyarakat yang menderita akibat inflasi. Kelompok masyarakat berpendapatan tetap tersebut akan menderita karena secara riil pendapatannya akan menurun atau menjadi lebih kecil. Sementara kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan untuk melindungi diri tidak menerima beban yang sama sebagai akibat adanya inflasi. Ketidakpastian besarnya laju inflasi juga dapat mengakibatkan semakin seriusnya beban atau bahaya inflasi. Laju inflasi yang terlalu berfluktuasi akan menimbulkan distorsi terhadap tingkat harga.

Dalam sistem ekonomi pasar, tingkat harga merupakan sinyal bagi rumah tangga maupun dunia usaha tentang keseimbangan alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu perekonomian. Contohnya apabila kenaikan harga tahu lebih besar dibandingkan harga tempe, maka hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk lebih banyak memproduksi tahu dan mendorong orang akan lebih banyak mengonsumsi tempe (dengan asumsi hal-hal lain tetap atau dalam istilah ekonominya ceteris

paribus). Kenaikan harga-harga saham di pasar modal yang secara relatif lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya merupakan tanda-tanda membaiknya prospek dunia usaha, yang lebih lanjut berarti adanya kesempatan untuk melakukan berbagai investasi yang menguntungkan. Harga relatif (bukan harga satu persatu barang dan jasa) merupakan sinyal yang sangat penting bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil berbagai keputusan yang strategis.

Apabila laju inflasi bergejolak (sangat berfluktuasi) dan tidak menentu, maka harga-harga secara relatif juga berubah terhadap tingkat harga secara umum, dan hal tersebut sangat berbahaya karena keadaan tersebut akan merusak sinyal ekonomi yang sangat penting dalam suatu perekonomian, yaitu harga. Perubahan dan variasi harga relatif yang timbul karena adanya ketidakpastian harga (inflasi) dapat mengakibatkan masyarakat (individu dan dunia usaha) memboroskan sumber-sumber daya ekonomi untuk mencari harga yang berbeda-beda. Salah satu contoh inflasi yang tidak menentu dan tak terkendali adalah apa yang disebut hiperinflasi, yaitu suatu keadaan ketika laju inflasi dapat meningkat ratusan atau bahkan ribuan persen dalam suatu waktu tertentu. Hiperinflasi sangat berbahaya bagi suatu perekonomian, dalam keadaan hiperinflasi setiap orang akan berusaha untuk membelanjakan uangnya sampai habis atau menukarkannya dengan mata uang yang lebih stabil sebelum harga-harga semakin meningkat. Pada tahun 1960-an Indonesia pernah mengalami hiperinflasi. Demikian juga sejumlah negara lain pernah mengalami apa yang disebut hiperinflasi tersebut, misalnya, Zimbabwe. Zimbabwe, sebuah negara di kawasan subsahara Afrika, mencatat rekor negara dengan hiperinflasi tertinggi di dunia, yaitu di atas dua juta persen pada 2007.

Dengan tingkat inflasi seperti itu, maka harga sebungkus roti bisa naik berkali-kali lipat dalam hitungan jam. Dalam keadaan hiperinflasi tersebut, tingkat harga sebagai sinyal tentang nilai suatu

barang atau jasa atau sebagai sinyal dalam alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu negara tidak berfungsi sama sekali. Sementara itu, dampak inflasi juga dapat dibedakan menjadi dampak inflasi yang terduga (*expected inflation*) dan dampak inflasi yang tak terduga (*unexpected inflation*). Baik inflasi yang terduga maupun yang tak terduga akan berpengaruh terhadap distribusi dan alokasi sumber daya dalam suatu perekonomian

#### **g. Strategi Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Upaya stabilisasi inflasi dalam sistem ekonomi Islam yang dapat meminimalisir inflasi, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan utang yang digantikan oleh pembiayaan berbasis ekuitas dan saham.
- 2) Keberadaan zakat dan hukum waris yang mempengaruhi distribusi pendapatan yang berpihak pada populasi yang kurang beruntung. Sehingga zakat dan waris dapat mempengaruhi komposisi permintaan agregat sedemikian rupa sehingga mengurangi fluktuasi permintaan agregat.
- 3) Pengurangan konsumsi yang boros dan mendorong konsumsi yang moderat. Hal ini akan menghasilkan penurunan permintaan agregat.
- 4) Uang publik dianggap sebagai amanah oleh pemerintah Islam. Oleh karena itu, mereka harus menjaga pengeluaran publik dalam batas-batas yang ditetapkan oleh sarana yang tersedia. Pembiayaan publik dari utang pemerintah sangat jarang terjadi karena tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya tidak ada dan dalam kasus pembiayaan utang/defisit, tingkat bunga harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Monetisasi utang/defisit dalam sistem ekonomi Islam hampir tidak ada.

Selain itu, terdapat beberapa solusi untuk mengendalikan inflasi dalam pandangan Ekonomi Islam, yaitu

- 1) Penerapan Sistem Moneter Berbasis Syariah. Penerapan sistem moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam,

termasuk pelarangan riba (bunga) dan spekulasi yang berlebihan, dapat membantu menghindari pemicu inflasi yang bersumber dari praktik-praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan etika Islam.

- 2) Manajemen Mata Uang. Dari sudut pandang Islam, menjaga stabilitas nilai mata uang merupakan hal yang penting. Pemerintah dan otoritas moneter harus mengambil langkah-langkah yang cermat untuk mengendalikan pertumbuhan uang dan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang sehingga inflasi tetap terkendali.
- 3) Keadilan dalam Distribusi Pendapatan. Prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan, termasuk zakat dan infak, merupakan bagian integral dari ekonomi Islam. Dengan menerapkan prinsip ini, ketimpangan ekonomi dapat dikurangi, sehingga mengurangi tekanan inflasi.
- 4) Investasi di Sektor Produktif. Mendorong investasi di sektor produktif dan infrastruktur ekonomi dapat meningkatkan kapasitas produksi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang lebih stabil.
- 5) Pengawasan dan Regulasi Ekonomi. Pengawasan yang ketat terhadap sektor keuangan dan bisnis dianjurkan dalam Islam untuk mencegah praktik monopoli, penipuan, dan eksploitasi yang dapat menyebabkan gejolak harga dan inflasi (Anggara, 2023).

#### **h. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi**

##### **1) Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi**

Teori yang menyoroti hubungan antara inflasi dan jumlah uang beredar adalah Teori Kuantitas Uang. Pertama, inflasi hanya bisa terjadi jika terdapat penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang beredar hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebabnya kenaikan harga tersebut. Kedua, laju inflasi ditentukan

oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa depan. (Boediono, 1985)

## 2) Pengaruh Harga Minyak Dunia terhadap Inflasi

Minyak bumi merupakan salah satu biaya variabel utama bagi seluruh industri, sehingga bila terjadi guncangan penawaran akan terasa efeknya ke semua bidang. Ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi harga bahan bakar minyak di seluruh dunia termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara importir minyak bumi.

Mekanisme transisi dampak oil price shock terhadap harga dan inflasi, dimana ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia maka perusahaan akan merespon dengan menaikkan markup sehingga harga akan naik, karena hubungan keduanya berbanding lurus. Dengan asumsi upah tetap, peningkatan harga minyak menyebabkan biaya produksi dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan harga (Blanchard, 2011)

## 3) Pengaruh KURS terhadap Inflasi

Nilai tukar Rupiah adalah perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antar negara di mana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut nilai tukar valuta asing atau nilai tukar (Dominick. 2008)

Nilai tukar yang melonjak-lonjak secara drastis tak terkendali akan menyebabkan kesulitan pada dunia usaha dalam merencanakan usahanya terutama bagi mereka yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri atau menjual barangnya ke pasar ekspor oleh karena itu pengelolaan nilai mata uang yang relatif stabil menjadi salah satu faktor moneter yang mendukung perekonomian secara makro (Aulia, 2008).

#### 4) Pengaruh BI rate terhadap Inflasi

Sebagaimana yang disebutkan dalam *Inflation Targeting Framework* bahwa *BI Rate* merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan merupakan sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter Bank. Tingkat bunga adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Tingkat bunga adalah jumlah uang yang dibayarkan per unit waktu. Dengan kata lain, masyarakat harus membayar biaya untuk meminjam uang.

#### 5) Pengaruh Defisit Fiskal terhadap Inflasi

Beberapa mekanisme utama yang menjelaskan hubungan antara defisit fiskal dan inflasi adalah:

##### a) Peningkatan Permintaan Agregat

Jika defisit fiskal dibiayai dengan pinjaman atau pencetakan uang, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan agregat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang dan jasa (inflasi).

##### b) Efek Monetisasi Utang

Jika bank sentral membeli surat utang pemerintah untuk membiayai defisit fiskal, maka basis moneter meningkat, yang dapat menyebabkan inflasi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sebanding.

##### c) Ekspektasi Inflasi

Defisit fiskal yang tinggi dapat menimbulkan kekhawatiran akan ketidakstabilan ekonomi, yang mendorong pelaku ekonomi untuk meningkatkan harga barang dan jasa sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan depresiasi nilai mata uang atau kenaikan pajak di masa depan.

##### d) Efek Crowding Out

Jika pemerintah membiayai defisit dengan menerbitkan utang, tingkat suku bunga bisa naik akibat meningkatnya

permintaan dana di pasar keuangan. Kenaikan suku bunga dapat menurunkan investasi swasta, sehingga dampak inflasi dari defisit fiskal bisa berkurang (Terrones, 2005).

## 2. *BI Rate* (Bunga Bank / Suku Bunga )

*BI Rate* yaitu kebijakan Bank Indonesia yang dikeluarkan setiap bulan rapat anggota dewan gubernur untuk mengatur keuangan yang terjadi pada kondisi perekonomian suatu negara. Suku bunga diartikan sebagai besarnya bunga yang pembayarannya di setiap periode waktu (Mahendra, 2016). Suku bunga BI ditentukan dari bank sentral yang dijadikan tujuan operasional tentang kebijakan moneter untuk peningkatan efektivitas kebijakan moneter.

*BI Rate* merupakan suku bunga acuan yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Perubahan *BI Rate* dapat mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Maka *BI Rate* perlu diatur besarnya agar jumlah uang beredar tetap terjaga dan stabil (Hidayat, 2017).

Pada teori tingkat bunga, bunga berfungsi alokatif pada suatu perekonomian seperti dalam penggunaan uang, selain itu fungsi tingkat bunga lainnya yaitu alokasi faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan digunakan saat ini dan dikemudian hari.

Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan untuk memilih berapa banyak instrumen dari kebijakan moneter yang berguna untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. *BI Rate* berfungsi sebagai suku bunga acuan dalam pengendalian alat moneter di Indonesia dalam rangka memerangi inflasi (Senen, 2020). Sebutan *BI Rate* juga digunakan untuk suku bunga acuan yang menggambarkan sikap kebijakan moneter di mana telah ditentukan dan dipublikasikan oleh BI. Dewan Gubernur BI mempublikasikan *BI Rate* pada setiap rapat bulanan Dewan Gubernur serta Bank Indonesia menggunakannya untuk melakukan operasi moneter melalui pengendalian likuiditas di pasar uang tujuannya yaitu untuk operasional instrumen moneter. Aktivitas ekonomi suatu negara diukur dengan suku bunga,

berdampak pada pergerakan arus keuangan bank, inflasi, investasi, dan fluktuasi mata uang. (Jamal, 2020).

Jika suku bunga peningkatannya lebih dari biaya pembiayaan kegiatan investasi meningkat karena bunga adalah harga memegang uang. Hal ini menyebabkan penurunan investasi. Efek pada penurunan produksi barang dan jasa dengan itu kinerja yang lebih rendah, biaya produksi biasanya tetap ketika SBI rate naik. Jangka waktu yang singkat tidak membebani pengelolaan keuangan perusahaan. Itu tidak akan berhasil mempengaruhi keputusan investasi, yang pada akhirnya menyebabkan defisit anggaran cenderung untuk tinggal. Dalam jangka panjang, jika ada kenaikan pajak lagi di 4-8 kuartel berikutnya, namun efek pertumbuhan tidak linier, artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi, karena yang seperti itu banyak indikator lain serta kondisi domestik. Suku Bunga Jangka Panjang tidak memiliki pengaruh terhadap investasi, karena keputusan investasi jangka panjang dibuat oleh faktor non ekonomi seperti kondisi politik dan situasi keamanan, dan akibatnya defisit anggaran tetap tidak berubah.

Suku bunga (*BI Rate*) adalah banyaknya rupiah yang dibayarkan sebab sebelumnya telah menggunakan dana yang berarti sebagai balas jasa, dimana apabila terjadi perubahan pada suku bunga maka itu berarti perubahan dalam hal permintaan uang. Suku bunga sendiri terbedakan menjadi dua jenis, suku bunga nominal serta suku bunga riil. Dalam pengertiannya suku bunga nominal merupakan kewajiban yang diperoleh untuk membayar bunga di tingkat tertentu tanpa perlu memperhatikan tingkat inflasi yang ada. Sedangkan suku bunga riil disini merupakan suku bunga nominal yang harus dikurangi inflasi. Bagi kreditur tingkat bunga riil merupakan imbalan nyata yang diperoleh karena telah mengorbankan penggunaan dananya dalam jangka waktu tertentu, beda bagi debitur tingkat bunga riil adalah beban yang ditanggung atas penggunaan dana orang lain. (Rompas, 2018)

Terdapat pengaruh yang signifikan *BI Rate* berpengaruh positif sebesar 0,270 artinya jika *BI Rate* mengalami kenaikan 1% maka inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,270 satuan. Sedangkan tingkat signifikansi *BI Rate* dan inflasi ditunjukkan dengan probabilitas sebesar  $0,006 > 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap inflasi. *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap inflasi dengan arah positif yang mengartikan bahwa perubahan *BI Rate* terhadap inflasi mengindikasikan perubahan yang berbanding lurus dengan inflasi. Hal ini dikarenakan kenaikan pada *BI Rate* akan berdampak pada kenaikan pada suku bunga kredit sektor riil. Pengusaha akan merasa terbebani dikarenakan pembiayaan untuk kredit akan bertambah. Untuk menutupi biaya tersebut, maka harga output di pasaran akan mengalami kenaikan, dan hal ini bisa memicu terjadinya inflasi. Oleh karena itu penetapan *BI Rate* sebagai alat pengendali inflasi harus dikaji lebih lanjut. Islam memberikan opsi untuk melakukan sistem bagi hasil, sehingga tidak akan menyebabkan kerugian pada masing-masing pihak seperti halnya jika ditetapkan kebijakan *BI Rate*.

Suku bunga adalah harga dari sebuah pinjaman yang mencerminkan jumlah yang dibayar oleh peminjam dan jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman atas tabungan mereka. Suku bunga merupakan instrumen yang dapat meredam inflasi karena salah satu yang mempengaruhi perubahan inflasi adalah suku bunga acuan Bank Indonesia atau *BI Rate*. Saat suku bunga antar bank mengalami peningkatan artinya Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan. Suku bunga memainkan peran penting dalam industri perbankan karena diterapkan pada pinjaman. Meskipun tingkat suku bunga pinjaman ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi dalam industri perbankan, namun tingkat suku bunga ditetapkan oleh bank tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki seperangkat kebijakan yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi untuk mengatur stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Pada saat *BI Rate* meningkat, maka suku bunga kredit dan deposito akan mengalami kenaikan, ketika suku bunga deposito naik, masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank sehingga jumlah uang beredar menjadi berkurang. Kenaikan suku bunga kredit mengakibatkan para pelaku usaha mengurangi investasinya karena semakin tingginya biaya modal. Hal inilah yang dapat meredam aktivitas ekonomi dan mengurangi tekanan inflasi (Yodiatmaja, 2012).

Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian, Bank Indonesia menggunakan BI 7 day Reverse Repo Rate (BI 7 DRRR) sebagai dasar utama kegiatan ekonomi yang memiliki dampak signifikan pada beberapa sektor baik dalam jangka waktu singkat maupun panjang. BI 7 DRRR adalah suku bunga acuan baru, dimana memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar. Penggunaan BI 7 DRRR memungkinkan bank-bank umum untuk menarik kembali dana yang mereka simpan di BI dalam tempo tujuh hari.

*BI 7 day reverse repo rate* merupakan tingkat bunga yang berlaku untuk SBI dengan tenor 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan seterusnya. Tingkat suku bunga ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan *BI rate* karena tenornya lebih singkat dibandingkan dengan tenor SBI 12 bulan. Ini disebabkan oleh prinsip bahwa semakin singkat periode penyimpanan uang, maka tingkat bunganya cenderung lebih rendah. Baik *BI rate* maupun *BI 7 day reverse repo rate* tidak bersifat 'memaksa', yang berarti saat BI menaikkan suku bunga acuan, bank-bank umum memiliki kebebasan untuk ikut menaikkan bunga simpanan atau tidak, dan sebaliknya.

Kenaikan dari *BI rate* merupakan suatu pertanda bahwa keadaan perekonomian sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Karena naiknya *BI rate* sehingga pasar modal bukan wadah yang baik bagi investor untuk berinvestasi serta lebih memilih untuk memindahkan dananya ke sektor perbankan. Peningkatan suku bunga bank juga itu akan memberikan

dampak kepada instrumen-instrumen investasi keuangan yang lain, seperti halnya saham ataupun obligasi.

Menurut situs Bank Indonesia, BI rate akan diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan serta diterapkan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas 14 (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Tujuan dari operasional kebijakan moneter tergambarkan dengan adanya suatu perubahan suku bunga Pasar Uang *Overnight Bank* (PUAB O/N). Perubahan suku bunga di pasar uang antar bank dinantikan dapat mengikuti perkembangan suku bunga deposito serta perkembangan suku bunga pinjaman bank. Brankas harus lebih rendah dari tingkat suku bunga pesaing. Bank Indonesia akan menaikkan *BI rate* apabila inflasi masa depan diperkirakan akan di atas dari yang telah ditetapkan, namun sebaliknya inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah yang telah ditetapkan maka Bank Indonesia akan menurunkan *BI rate*.

Bank Indonesia menerbitkan *BI Rate* sebagai suku bunga acuan yang dipergunakan perbankan dalam pemberian bunga untuk nasabah dan penetapan suku bunga kredit. Tingkat bunga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan tiap unit waktu. Dengan kata lain, masyarakat harus membayar biaya untuk meminjam uang. Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa, ketika suku bunga acuan mengalami kenaikan maka sektor usaha yang memiliki beban hutang harus membayar lebih sehingga akan menaikkan biaya produksi dan harga barang pun akan meningkat. Jika hal ini terjadi terus menerus maka akan terjadi inflasi. Fadilla dan Aravik (2018) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Ketika suku bunga acuan mengalami peningkatan maka akan meningkatkan inflasi dan sebaliknya. Teori Gibson dalam Irawan (2017) bahwa tingkat harga dan tingkat suku bunga memiliki kecenderungan yang sama, jika suku bunga naik maka harga – harga akan naik juga.

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dapat mempengaruhi inflasi, karena perubahan *BI Rate* mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di sektor perbankan daripada menginvestasikan pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat resiko yang lebih besar, sehingga kegiatan pada sektor riil tidak terlalu tinggi, dengan demikian tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga (Dabukke. 2017)

Bank Indonesia akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di atas sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan turunnya nilai mata uang karena jumlah uang yang beredar berlebih atau terlalu banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi, dengan naiknya suku bunga Bank Indonesia maka tingkat inflasi akan menurun. Karena naiknya bunga bank merupakan sebuah tindakan untuk meredam inflasi (Filbert.2016)

#### **a. Teori *BI Rate***

##### 1) Teori Transmisi Mekanisme Moneter

Perubahan *BI Rate* akan mempengaruhi suku bunga pasar, yang kemudian akan berdampak pada permintaan agregat dan inflasi.

Jika *BI Rate* mengalami kenaikan :

- a) Suku bunga kredit naik, sehingga biaya pinjaman menjadi lebih mahal.
- b) Konsumsi dan investasi cenderung menurun karena masyarakat dan perusahaan lebih berhati-hati dalam membelanjakan dan berinvestasi.
- c) Permintaan agregat melemah, sehingga tekanan inflasi berkurang.

Jika *BI Rate* mengalami penurunan :

- a) Suku bunga kredit turun, sehingga biaya pinjaman menjadi lebih murah.
- b) Konsumsi dan investasi cenderung meningkat, sehingga permintaan agregat menguat.
- c) Jika kapasitas produksi sudah mendekati batas, peningkatan permintaan agregat dapat mendorong inflasi.

## 2) Teori Ekspektasi Inflasi

Ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di masa depan akan mempengaruhi perilaku mereka saat ini.

Jika *BI Rate* mengalami kenaikan :

- a) Menunjukkan komitmen BI untuk menjaga stabilitas harga.
- b) Mengurangi ekspektasi inflasi masyarakat, sehingga mereka tidak akan menaikkan harga secara agresif.

Jika *BI Rate* mengalami penurunan :

Dapat meningkatkan ekspektasi inflasi jika masyarakat khawatir kebijakan ini akan memicu tekanan inflasi di masa depan.

### **b. Strategi Komunikasi *BI Rate***

Untuk lebih memudahkan masyarakat memahami tentang kebijakan moneter Bank Indonesia yang dilihat dari perubahan *BI Rate*, maka dilakukan berbagai strategi komunikasi terhadap masyarakat. Tujuan strategi komunikasi ini menurut Dahlan Siamat adalah untuk membantu secara bertahap menurunkan dan mengarahkan ekspektasi inflasi di masyarakat ke sasaran inflasi yang ditetapkan.

Hal ini menjadi sangat penting karena di Indonesia pengaruh dari ekspektasi inflasi sebagai faktor penyebab inflasi, disamping dampak administered prices, volatile foods dan pengaruh langsung nilai tukar (*direct exchange rate pass-through*). Selain melalui press release dan konferensi pers yang secara reguler mengumumkan keputusan RDG, penguatan strategi komunikasi tersebut dilakukan melalui penerbitan Laporan Kebijakan moneter secara triwulanan. Di dalamnya akan memuat assesmen menyeluruh Bank Indonesia mengenai

perkembangan terkini makroekonomi, inflasi, kondisi moneter, prakiraan inflasi kedepan, dan respon kebijakan moneter yang diperlukan untuk membawa inflasi ke arah sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Strategi komunikasi lain yang lazim dipraktikkan oleh bank-bank sentral yang menerapkan ITF (*Inflation Targeting Framework*) adalah dengan penjelasan penjelasan Dewan Gubernur mengenai kebijakan moneter di berbagai kesempatan maupun publikasi dan penjelasan mengenai kerangka kebijakan moneter yang 17 baru, proses inflasi di Indonesia, proses perumusan kebijakan moneter, model-model prakiraan ekonomi, maupun operasi-operasi moneter. Selain itu juga melalui media elektronik dan juga website Bank Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui :

- 1) *Press Realease*.
- 2) Laporan Kebijakan moneter secara triwulanan.
- 3) Publikasi dan penjelasan Dewan Gubernur.
- 4) Media elektronik.
- 5) Situs resmi Bank Indonesia.

Selain strategi komunikasi terhadap masyarakat, diperlukan juga koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat sejalan dengan kebijakan umum pemerintah.

### **c. Fungsi *BI Rate***

Bank Indonesia saat ini menggunakan tingkat suku bunga atau *BI Rate* sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan tingkat inflasi melalui pengendalian peredaran uang. BI menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan BI menaikkan *BI Rate* adalah mengendalikan inflasi dengan menurunkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, BI akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan.

BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia pada setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan dilaksanakan dalam operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai tujuan operasional kebijakan moneter. Tujuan operasional kebijakan moneter tercermin dari perkembangan suku bunga Pasar Uang Semalam Antar Bank (PUAB). Pergerakan suku bunga PUAB diharapkan akan diikuti oleh perkembangan suku bunga simpanan dan selanjutnya suku bunga pinjaman bank. (Bank Indonesia)

Prinsip dasarnya adalah Bank Indonesia akan menaikkan besaran BI rate jika perkiraan kedepannya inflasi melebihi ketetapan ambang batas, dan Bank Indonesia akan menurunkan besaran BI rate jika kedepannya tidak mencapai batas inflasi yang ditetapkan. Bank Indonesia melaksanakan penguatan kerangka operasi moneter lewat cara memperkenalkan suku bunga acuan yang baru yaitu BI7 Day Repo Rate, ketetapan diberlakukan sejak 19 Agustus 2016.

Pada saat level *BI Rate* naik maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan jumlah uang yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan merangsang para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya karena biaya modal semakin tinggi. Hal demikianlah yang meredam aktivitas ekonomi dan pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi. Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk meredam inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga *BI Rate*. Dalam aliran Monotaris, tabungan adalah fungsi dari tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung atau berinvestasi pada surat berharga, artinya semakin tinggi tingkat suku bunga akan semakin mendorong preferensi masyarakat untuk mengorbankan atau mengurangi tingkat pengeluaran untuk konsumsinya dan lebih memilih untuk menambah tabungan

ataupun melakukan investasi pada surat-surat berharga, karena akan mendapat keuntungan dari tingginya tingkat suku bunga. (Putri Yeni, 2018)

Tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di sektor perbankan daripada menginvestasikan pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat resiko yang lebih besar, sehingga kegiatan pada investasi sektor riil (investasinya terlihat dan bisa dipegang secara langsung) tidak terlalu tinggi, dengan demikian tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga.

#### **d. Hubungan *BI Rate* Terhadap Inflasi Di Indonesia**

Hubungan antara laju inflasi dan tingkat bunga dapat juga dijelaskan dari sisi lain, yakni laju inflasi akan berpengaruh terhadap suku bunga. Laju inflasi yang relatif tinggi mendorong bank sentral mengambil kebijakan moneter untuk mengantisipasi inflasi tinggi tersebut. Salah satu instrumen kebijakan moneter dalam mengendalikan laju inflasi adalah tingkat bunga (*rediscount policy*). Jadi dalam konteks ini laju inflasi menentukan tingkat bunga.

Persamaan Fisher dapat pula digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dengan laju inflasi. Tingkat bunga yang diperoleh dari mendepositokan uang di bank merupakan pendapatan yang diperoleh pemilik uang. Namun demikian tingkat bunga yang dihasilkan dari deposito tersebut tidaklah menggambarkan kenaikan nilai uang yang sesungguhnya, karena dalam masa periode deposito terjadi perubahan harga. Misalnya dalam masa periode deposito terjadi kenaikan harga (inflasi), maka sebenarnya kenaikan nilai uang yang didepositokan adalah sebesar tingkat bunga dikurangi laju inflasi. (Mankiw, 2003).

Pemberi pinjaman dan peminjam lebih memperhatikan tingkat bunga riil dibandingkan tingkat bunga nominal. Tingkat bunga riil diketahui hanya setelah kenyataannya terjadi, yaitu hanya setelah inflasi

betul-betul terjadi. Tingkat bunga nominal selalu positif, tetapi tingkat bunga riil bisa saja menjadi negatif. Karena masa depan tidak pasti, pemberi pinjaman dan peminjam harus membentuk ekspektasi atau perkiraan mengenai inflasi, dan kemudian mendasarkan kemauannya untuk meminjam atau meminjamkan pada ekspektasi tersebut. Bila hal lain diasumsikan konstan, semakin tinggi ekspektasi tingkat bunga, semakin tinggi juga tingkat bunga nominal yang diinginkan pemberi pinjaman dan yang mau dibayar oleh peminjam. Peminjam dan pemberi pinjaman mendasarkan keputusannya pada ekspektasi tingkat bunga riil, yaitu tingkat bunga nominal dikurangi ekspektasi tingkat inflasi (Eachern, 2000).

Perubahan BI Rate akan mempengaruhi beberapa variabel makroekonomi yang kemudian diteruskan kepada inflasi. Perubahan berupa peningkatan level BI Rate bertujuan untuk mengurangi laju aktifitas ekonomi yang mampu memicu inflasi. Pada saat level BI Rate naik maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan jumlah uang yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan merangsang para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya karena biaya modal semakin tinggi. Hal demikianlah yang meredam aktivitas ekonomi dan pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

Sebaliknya pada saat level BI Rate turun maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami penurunan. Ketika suku bunga deposito turun, keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank akan menurun. Kondisi ini memicu peningkatan jumlah uang beredar yang selanjutnya akan meningkatkan transaksi masyarakat. Pada suku bunga kredit, penurunan suku bunga akan merangsang peningkatan permintaan kredit dari pelaku usaha karena murahnya biaya modal. Pada kondisi ini maka keadaan ekonomi yang lesu akan segera meningkat. Adanya tambahan likuiditas yang ada di masyarakat

untuk bertransaksi akan diimbangi oleh peningkatan produksi di sisi pelaku usaha maka pada akhirnya akan meningkatkan kegiatan ekonomi (Yodiatmaja, 2012)

Inflasi dan suku bunga saling berkaitan, hal ini sering diungkapkan dalam Ekonomi Makro. Inflasi merujuk pada tingkat kenaikan harga barang dan juga jasa. Sementara suku bunga di Indonesia merujuk pada tingkat suku bunga yang diatur oleh Bank Indonesia atau BI Rate. Tujuan ditetapkannya suku bunga Bank Indonesia adalah untuk menentukan dan mengendalikan tingkat inflasi agar perekonomian dapat berjalan dengan stabil dan tanpa guncangan yang berarti. Mekanisme BI mengendalikan laju inflasi dengan menggunakan BI Rate adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate apabila inflasi diperkirakan pada bulan-bulan ke depan akan melewati sasaran inflasi yang telah ditetapkan.
- 2) Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi diperkirakan pada bulan-bulan ke depan akan berada di bawah sasaran inflasi yang telah ditetapkan. (Nofinawati, 2017)

Disaat suku bunga (BI Rate) rendah, pengaruh yang timbul adalah semakin banya orang meminjam uang. Akibatnya, konsumsi bertambah karena uang yang beredar akan meningkat, ekonomi mulai tumbuh, dan efek lanjutannya adalah inflasi akan naik. Dampak sebaliknya juga berlaku, jika suku bunga BI Rate tinggi, orang yang meminjam uang makin sedikit, hasilnya lebih banyak orang yang menahan belanja, mereka lebih memilih menabung, maka tingkat konsumsi akan menurun dan tingkat inflasi juga menurun.

#### e. Pandangan Islam Tentang Tingkat Suku Bunga BI Rate

Bunga merupakan kewajiban atas peminjaman uang yang pada umumnya dinyatakan dalam bentuk presentase atas yang yang telah dipinjam. Di dalam Islam, bunga bukan merupakan dari instrument keuangan karena bunga seperti halnya riba yang dihukumi haram dalam Islam. Disini pengertian riba yang dimaksud yaitu bertambahnya sesuatu melebihi kadar yang seharusnya, dalam artian membayar utang yang melebihi utang pokoknya.

Sejauh ini riba dibagi menjadi dua, yaitu riba *nasi'ah* dan *fadl*. Pengertian dari riba *nasi'ah* yaitu riba yang berkaitan antara tukar-menukar uang yang sama namun menjadi riba karena terjadi penambahan uang yang harus dikembalikan karena keterlambatan pembayaran. Sementara riba *fadl* merupakan riba yang terjadi akibat pertukaran antar barang yang tidak adil serta tidak sesuai ketentuan umum.

### 3. Jumlah Uang Beredar

Menurut Bank Indonesia (2015), uang beredar dalam arti sempit (M1) meliputi uang kartal yang dipegang oleh masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi rupiah), sedangkan dalam arti luas (M2) meliputi (M1), uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dari valas serta giro dalam valuta asing) dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. M1 terdiri dari unsur-unsur yang sesungguhnya digunakan dalam transaksi. Berikut Unsur-unsur M1 sebagai berikut :

- a. Uang kertas dan uang koin/logam. M1 termasuk uang kertas dan uang koin yang tidak dipegang oleh bank sentral. Jumlah uang kertas dan uang koin dinamakan uang kartal (*currency*) adalah sekitar seperempat dari M1 atau total uang transaksi.
- b. Rekening koran/giro disebut sebagai uang giral yang merupakan dana milik masyarakat yang disimpan pada bank dan lembaga uang lainnya,

yang mana belum dipergunakan pemiliknya untuk melakukan pembayaran atau dibelanjakan sehingga dapat digunakan untuk pembayaran transaksi dengan cara menulis dan menandatangani cek.

Sedangkan dalam arti luas, M2 meliputi M1 serta uang kuasi (mencakup tabungan deposito berjangka, rekening valas, serta giro dalam valuta asing) dan surat berjangka yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. M2 terkadang disebut sebagai *asset money* atau *near money* karena simpanan berjangka, rekening valas serta giro dalam valuta asing bukan merupakan uang transaksi karena tidak dapat digunakan sebagai alat tukar untuk semua pembelian. Namun disebut sebagai *near money* karena dapat ditukarkan menjadi uang kontendek tanpa kehilangan nilainya.

Jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada ditangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) adalah jumlah uang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. Secara teknis yang dihitung sebagai jumlah uang beredar adalah uang yang benar benar berada ditangan masyarakat. Uang yang berada ditangan bank (bank umum dan bank sentral) serta uang kertas dan logam(uang kartal) milik pemerintah tidak dihitung sebagai uang beredar (Anggarini 2016:163).

Jumlah uang beredar merujuk pada total uang yang ada pada perekonomian pada waktu tertentu. Operasi pasar terbuka dan kebijakan lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah bentuk kebijakan moneter yang dapat memengaruhi jumlah uang beredar. Ketika Bank Indonesia menerbitkan lebih banyak uang juga membeli surat utang pemerintah untuk meningkatkan jumlah uang beredar, hal ini dapat memicu inflasi jika peningkatan tersebut melebihi laju pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang beredar adalah semua jenis uang yang terdapat dalam sebuah perekonomian. Jumlah uang beredar terdiri dari dua komponen. Pertama, Jumlah uang beredar dalam arti sempit yaitu

peredaran uang kartal ditambah dengan uang giral yang dimiliki entitas masyarakat, korporasi, dan badan pemerintah. Kedua, jumlah uang beredar dalam arti luas meliputi uang kartal, uang giral dan deposito berjangka, tabungan dan valuta asing (Sukirno, 2004). Menurut Milton Friedman, penjagaan pada jumlah uang beredar sangatlah penting karena hubungan korelasionalnya dengan inflasi dalam perekonomian sehingga membutuhkan kestabilan agar tidak berdampak pada perekonomian. Peningkatan jumlah uang beredar yang melebihi batas kebutuhan dalam perekonomian akan mendorong masyarakat untuk berspekulasi terhadap valuta asing dan mengakibatkan pelemahan pada nilai rupiah, sehingga M1 memiliki peran penting di masyarakat. melemahkan nilai rupiah, sehingga M1 memiliki peran penting di masyarakat. Pertumbuhan jumlah uang beredar sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara dan berperan dalam menentukan inflasi jangka panjang. Selain itu, jumlah uang beredar memengaruhi nilai uang melalui tingkat. (Awang, 2016).

Harga dan produk pertumbuhan jumlah uang beredar yang sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara dan memiliki peran dalam menentukan inflasi jangka panjang. Selain itu, jumlah uang beredar mempengaruhi nilai uang melalui tingkat harga dan produk. Jumlah uang beredar yang lebih besar dibandingkan produksi barang dan jasa akan berdampak pada peningkatan harga-harga sehingga nilai uang akan menurun (Luwahadi 2017).

Jumlah uang beredar biasanya dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk mata uang baik itu giro, uang kartal ataupun uang kuasi berupa deposito, valuta asing, dan tabungan (Putri and Kharisma, 2020). Jumlah Uang Beredar juga bisa berarti dengan kewajiban sistem moneter kepada sektor dalam negeri. (Yosephina and Murtala, 2019). Dalam rentang waktu satu tahun, giro, uang milik masyarakat (selain Bank Umum dan BPR), serta surat berharga yang diterbitkan selain saham dan uang kuasi milik swasta domestik adalah contoh dari kewajiban serta merupakan bagian dari Jumlah Uang Beredar. Akibatnya, tingkat

peredaran uang saat ini dipengaruhi oleh ketersediaan uang inti (Warkawani et al., 2020). Karena arti dari istilah uang beredar sangat kompleks, maka dapat dibagi dalam dua kategori, baik uang beredar dalam arti sempit (M1) maupun uang beredar dalam arti luas (M2). Uang beredar dalam arti sempit (M1) yaitu semua uang yang beredar, termasuk giro (uang bank), yang merupakan simpanan dan disimpan pada bank umum serta dapat dikeluarkan melalui giro, cek, atau pesanan lainnya, serta mata uang (uang koin dan kertas) yang beredar. Sedangkan uang beredar dalam arti luas (M2) diartikan sebagai penjumlahan dari uang kuasi (QM) dengan uang beredar dalam arti sempit (M1). Karena kedua jenis simpanan masyarakat ini dapat diuangkan oleh pemiliknya untuk berbagai keperluan transaksional, maka uang kuasi dikategorikan sebagai uang beredar (Adim, 2021).

Pada umumnya jumlah uang beredar (JUB) dianggap bisa ditentukan secara langsung oleh penguasa moneter tanpa mempersoalkan hubungannya dengan uang inti, yang terdiri dari uang kartal ditambah dengan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank umum. Perilaku seperti ini berlandaskan pada analisis penentuan jumlah uang beredar secara mekanis, di mana jumlah uang beredar dihubungkan dengan uang inti lewat angka pengganda. Besarnya angka pengganda ini ditentukan oleh rasio cadangan perbankan dan rasio antara uang kartal dengan uang giral. Jumlah uang beredar meliputi mata uang di tangan publik dan deposito bank-bank yang bisa digunakan rumah tangga untuk bertransaksi, seperti rekening koran. Artinya, dengan  $M$  menyatakan jumlah uang beredar,  $C$  mata uang asing dan  $D$  rekening giro (*demand deposit*), dan dapat ditulis (Mankiw, 2018:499).

$$M = C + D$$

Keterangan :

$M$  = Jumlah Uang Beredar

$C$  = Mata Uang Asing

$D$  = Rekening Giro

Deposito yang diberikan bank tetapi tidak dipinjamkan disebut cadangan (*reserves*). Sebagaimana cadangan ini berada di bank-bank lokal di seluruh negeri, tetapi sebagian besar ada di Bank Sentral, seperti bank AS. Dalam perekonomian seluruh deposit dijadikan sebagai cadangan, bank hanya menerima deposit, menjadikan uang sebagai cadangan, dan menyimpannya sampai pemiliknya menarik uang itu atau menulis cek. Sistem ini disebut perbankan dengan cadangan 100% (*100-percent-reserve banking*) (Mankiw,2018:450).

#### **a. Teori Kuantitas Uang**

Kuantitas uang merupakan jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat. Pada teori Keynes mengenai teori permintaan uang menyatakan bahwa permintaan uang kas bertujuan untuk transaksi dan berjaga-jaga tergantung dari pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan maka besar keinginan untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Menurut Keynes, terjadinya inflasi disebabkan oleh permintaan aggregate, namun disebabkan oleh pengeluaran pemerintah ataupun swasta dan konsumsi pemerintah melebihi penerimaan. Besaran jumlah uang yang beredar tidak hanya ditentukan oleh bank sentral namun ditentukan oleh pelaku rumah tangga (yang memegang uang) dan bank. Karena kita ketahui bahwa jumlah uang yang beredar meliputi uang kartal dan uang giral yang digunakan oleh rumah tangga untuk bertransaksi.

Teori kuantitas uang merupakan teori yang mengemukakan adanya hubungan langsung antara perubahan jumlah uang beredar dengan perubahan harga barang. Hubungan tersebut dapat dikemukakan bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang beredar. Meskipun teori kuantitas uang merupakan teori yang umum digunakan untuk menggambarkan hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar, namun terdapat teori yang tidak setuju dan cenderung menentang teori kuantitas uang tersebut.

Menurut teori kuantitas, naiknya inflasi terjadi apabila ada penambahan laju JUB. Kejadian seperti gagalnya panen hanya

menyebabkan naiknya harga untuk sementara waktu bukan inflasi. Tingkat pertumbuhan dalam kuantitas uang menentukan tingkat inflasi (Mankiw, 2018). Teori yang dikembangkan oleh Irving Fisher ini menjelaskan bahwa mekanisme moneter bersifat secara langsung, laju JUB merupakan penyebab utama inflasi (Natsir, 2014).

Menurut Keynesian, inflasi akan terjadi saat permintaan barang lebih besar daripada stok barang yang tersedia. Inflasi dorongan biaya terjadi ketika harga input untuk barang cenderung naik. Hal ini bisa terjadi karena jumlah uang beredar yang lebih besar pada tingkat yang lebih cepat daripada perubahan preferensi konsumen. Walaupun dalam teorinya disebutkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan inflasi, namun ada keadaan dimana peningkatan jumlah uang beredar tidak akan meningkatkan inflasi. Jika peningkatan jumlah uang beredar lebih cepat daripada pertumbuhan output riil, maka inflasi akan terjadi. Alasannya adalah ada lebih banyak uang beredar, namun jumlah stok barang dipasaran tetap. Selanjutnya, permintaan barang akan meningkat sehingga perusahaan menaikkan harga barang. Disisi lain, jika peningkatan jumlah uang beredar sama dengan output riil, maka harga barang akan tetap sama sehingga tidak menyebabkan terjadinya inflasi.

Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang beredar cenderung menyebabkan inflasi jika pertumbuhan jumlah uang beredar melebihi pertumbuhan output ekonomi. Ketika lebih banyak uang beredar dalam perekonomian, daya beli masyarakat meningkat, yang dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, menyebabkan kenaikan harga.

Jumlah Uang Beredar terlepas dari bagaimana kaitannya dengan uang inti yaitu mata uang ditambahkan dengan persediaan yang dipegang oleh bank komersial, biasanya dikendalikan langsung oleh otoritas moneter. Perilaku tersebut didasarkan pada analisis mekanis terhadap jumlah uang beredar yang menghubungkan JUB dengan uang

inti melalui pengganda. Nilai pengganda didasarkan pada rasio cadangan bank dan pembagian antara giro dan setoran tunai (Sriwahyuni, 2020).

Menurut Milton Friedman, penjagaan pada jumlah uang beredar sangatlah penting karena hubungan korelasinya dengan inflasi dalam perekonomian sehingga membutuhkan kestabilan agar tidak berdampak pada perekonomian. Peningkatan jumlah uang beredar yang melebihi batas kebutuhan dalam perekonomian akan mendorong masyarakat untuk berspekulasi terhadap valuta asing dan mengakibatkan pelemahan pada nilai rupiah, sehingga M1 memiliki peran penting di masyarakat (Awang, 2016).

Putra(2014) berpendapat bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar yang sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara dan memiliki peran dalam menentukan inflasi jangka panjang.

#### **b. Hubungan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi Di Indonesia**

Pengukuran jumlah uang beredar dapat dilakukan melalui dua pendekatan yang berbeda, yaitu pengukuran M2 dan M1. Pengukuran M1, dalam pengertian yang lebih sempit, mencakup uang yang dimiliki oleh masyarakat umum dalam bentuk uang tunai dan giro. Sebaliknya, ukuran M2 memasukkan M1 dan menambahkan uang kuasi ke dalam perhitungan. Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory of Money*) adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara inflasi dan jumlah uang yang beredar. Walaupun teori ini telah ada sejak lama, namun tetap relevan dalam menjelaskan mekanisme inflasi pada zaman modern, terutama di negaranegara berkembang. Teori ini menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena adanya tiga faktor utama :

- 1) Inflasi hanya terjadi apabila terjadi peningkatan dalam jumlah uang yang beredar. Tanpa adanya peningkatan tersebut, kenaikan harga akan bersifat sementara. Jika tidak ada penambahan jumlah uang, inflasi akan berhenti secara alami.

- 2) Harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa depan juga mempengaruhi inflasi. Jika masyarakat memperkirakan harga akan naik, hal ini dapat memicu peningkatan permintaan dan akhirnya menyebabkan inflasi.
- 3) Tingkat inflasi dipengaruhi oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan juga oleh faktor psikologis masyarakat yang terkait dengan harapan harga yang lebih tinggi di masa depan (Sipayung dan Budhi. 2012).

Secara teoritis, jumlah uang beredar mempengaruhi nilai uang. Hal tersebut tercermin pada tingkat harga dan produk, ketika jumlah uang beredar lebih besar dibandingkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan berdampak pada peningkatan harga-harga sehingga nilai uang turun. Sebaliknya, jumlah uang beredar yang lebih kecil dibandingkan produksi barang dan jasa akan mengakibatkan penurunan tingkat harga.

Tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi secara konsisten akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang rendah akan menyebabkan inflasi yang rendah. Selanjutnya, klaim bahwa inflasi adalah fenomena moneter menyiratkan bahwa inflasi yang tinggi tidak dapat dipertahankan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam jumlah uang beredar. (Handayani, 2019).

Penawaran uang memiliki perubahan penawaran yang akan mempengaruhi peningkatan harga-harga. Sebab jika penawaran jumlah uang beredar meningkat, maka harga – harga biasanya juga ikut bertambah. Sebaliknya jika penawaran jumlah uang beredar berkurang, maka harga-harga juga akan berkurang. Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi. Apabila jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, maka jumlah uang beredar di masyarakat berkurang, dan tingkat inflasi mengalami penurunan. Jumlah uang

beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia (Sukirno, 2004).

Inflasi terjadi apabila naiknya harga barang itu menyeluruh atau berdampak pada kenaikan harga barang lainnya (Bank Indonesia). Jika inflasi mengalami kenaikan yang tinggi dan diluar dikontrol dapat menjadi hal yang ditakuti perekonomian dan akan menyebabkan dampak negatif pada perekonomian negara. Dalam riwayat perekonomian Indonesia, inflasi yang tinggi dan sulit dikontrol pernah terjadi sebelumnya. Inflasi yang tinggi di Indonesiapernah terjadi pada tahun 1960- 1990'an. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1966 sebesar 136% dikarenakan defisit anggaran belanja pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang. (Handayani, 2019).

Jika ingin menjaga inflasi yang rendah dan stabil, tentunya pemerintah tersebut harus menjaga kestabilan harga. dengan menekan laju kenaikan JUB. Pertumbuhan JUB yang tinggi terus menerus akan menyebabkan laju inflasi yang tinggi begitu pula sebaliknya. Kebijakan bank sentral dan perilaku rumah tangga selaku pemegang uang menentukan jumlah uang yang beredar. JUB terdiri dari mata uang di masyarakat dan deposito di bank yang bisa digunakan masyarakat untuk bertransaksi. Perubahan JUB memberikan pengaruh ke perekonomian karena dengan bertambahnya JUB memengaruhi permintaan barang dan jasa sehingga akan memberikan dampak terhadap inflasi. Secara empiris, jika JUB diluar kendali dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perekonomian terlihat pada kurang terkendalinya perekonomian khususnya tingkat inflasi. Perubahan JUB yang tidak terkendali bisa mengakibatkan naiknya harga yang tinggi memberikan dampak rusaknya pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan masalah lain. Sebaliknya, jika terjadi perubahan jumlah uang beredar yang terlalu rendah, perekonomian akan mengalami kelesuan apabila terjadi dalam jangka panjang akan merusak kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian JUB memiliki peran penting bagi

perekonomian. Pengendalian JUB adalah salah satu dari kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga stabilitas moneter dan mendorong kegiatan ekonomi (Natsir, 2014).

#### **4. Defisit Fiskal**

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan *agregat* suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Dalam pengelolaan stabilitas makro ekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal erat kaitannya dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh suatu negara. Kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro sekaligus kebijakan utama pemerintah. Sementara itu, kapasitas fiskal diartikan sebagai kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan anggaran belanja negara yang disebut dengan kebutuhan fiskal.

Defisit fiskal adalah kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pajaknya. Defisit fiskal dapat dibiayai pemerintah dengan meminjam di pasar obligasi dan akumulasi pinjaman pemerintah pada masa lalu yang disebut dengan utang, pemerintah. Defisit fiskal mengacu pada kekurangan pendapatan pemerintah dibandingkan dengan pengeluarannya selama periode tertentu. Ketika suatu negara mengalami defisit fiskal, itu berarti pemerintah membelanjakan lebih dari yang seharusnya. Defisit fiskal dihitung sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau dengan menentukan jumlah pengeluaran atas pendapatan. Defisit fiskal juga disebut defisit nasional, terjadi ketika pemerintah suatu negara membelanjakan lebih banyak uang dari pada diperolehnya selama tahun fiskal. Ini berarti lebih banyak uang keluar dibanding uang masuk (Mankiw 2008).

Besarnya defisit fiskal atau nasional bergantung sepenuhnya pada beberapa faktor berikut :

- a. Keadaan ekonomi suatu negara (pengangguran, pendapatan bisnis dan harga).
- b. Kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah dan pengumpulan pendapatan).

Defisit fiskal sering kali terjadi saat pemerintah bermaksud meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat atau untuk menggiatkan pembangunan ekonomi. Cara yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan pengeluaran (*government expenditure*) atau menurunkan tingkat pajak. Jika pemerintah menempuh kebijakan defisit, maka pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Untuk menutupi pengeluaran yang lebih besar, pembiayaannya dapat dilakukan melalui empat sumber, antara lain mengambil cadangan mata uang asing, melalui pinjaman domestik dengan cara menjual surat berharga kepada masyarakat dan pinjaman luar negeri. (Fleegler, 2006)

Terdapat beberapa definisi defisit. Secara konvensional, defisit dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Sementara itu, pengertian kedua adalah defisit moneter. Defisit moneter adalah selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang). Pengertian ketiga adalah defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal. Defisit primer merupakan selisih antara belanja (diluar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan. Selain itu, masih terdapat beberapa definisi dari defisit dan sangat tergantung pada kriteria yang digunakan serta tujuan analisis. Biasanya pilihan konsep defisit yang tepat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain, jenis ketidakseimbangan yang terjadi, cakupan pemerintah (pemerintah pusat, konsolidasi pemerintah, dan sektor publik), metode akuntansi (*cash dan accrual basis*), dan status dari *contingent liabilities* (Simanjuntak dalam Waluyo, 2004).

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjanya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Sadono, 2013) dalam Eva dan Muhammad, 2016). Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu.

Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negara. Pembuatan kebijakan ini tidak lain didasarkan pada teori John Maynard Keynes mengenai fungsi kebijakan fiskal. Dalam teori ini Keynes meyakini bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian negara. Kebijakan ini bisa meningkatkan inflasi, aliran kas, dan mengatasi pengangguran dalam suatu negara. Melalui kebijakan ini pengeluaran agregat dapat ditingkatkan yang bisa berdampak pada pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Selain itu permintaan agregat mengenai jumlah produksi barang dan jasa pada tingkat harga tertentu juga menjadi tolak ukur keberhasilan negara (Eva dan Muhammad, 2016).

#### **a. Teori Defisit Fiskal**

##### 1) Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory of Money*):

Inflasi terjadi ketika jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan output riil. Kaitannya dengan Defisit Fiskal yaitu jika pemerintah membiayai defisit dengan mencetak uang baru, maka jumlah uang beredar akan meningkat. Peningkatan jumlah uang ini dapat mendorong permintaan agregat dan menyebabkan tekanan inflasi.

## 2) Teori Ekspektasi Inflasi

Ekspektasi masyarakat akan inflasi di masa depan dapat menjadi *self-fulfilling prophecy*. Kaitannya dengan Defisit Fiskal yaitu jika masyarakat memperkirakan bahwa defisit fiskal akan terus berlanjut dan menyebabkan inflasi, maka mereka akan menaikkan harga jual barang dan jasa mereka saat ini. Hal ini akan mempercepat terjadinya inflasi.

## 3) *Fiscal Theory of the Price Level* (FTPL)

Tingkat harga ditentukan oleh kebijakan fiskal jangka panjang. Defisit fiskal yang persisten dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Kaitannya dengan Defisit Fiskal yaitu FTPL menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya dan menjaga stabilitas harga.

Berikut beberapa teori yang menjelaskan bagaimana defisit fiskal dapat memicu inflasi, sebagai berikut :

### 1) Pencetakan Uang

Untuk menutup defisit, pemerintah seringkali mencetak uang baru. Peningkatan jumlah uang beredar tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa dapat menyebabkan permintaan akan barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada pasokan, sehingga mendorong harga naik.

### 2) Peningkatan Belanja Pemerintah

Defisit fiskal sering kali dibiayai dengan meningkatkan belanja pemerintah. Peningkatan belanja ini dapat meningkatkan permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat mendorong harga naik jika produksi tidak dapat mengikuti.

### 3) Efek *Crowding Out*

Defisit fiskal dapat menyebabkan pemerintah meminjam lebih banyak uang, sehingga mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk sektor swasta. Hal ini dapat meningkatkan suku bunga dan

mengurangi investasi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan inflasi.

#### **b. Dampak Defisit Fiskal Terhadap Inflasi di Indonesia**

Defisit fiskal terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatan yang diperoleh, biasanya melalui pajak. Dampak defisit fiskal terhadap inflasi di Indonesia bisa terjadi melalui beberapa mekanisme berikut ini :

##### 1) Peningkatan Permintaan Agregat.

Defisit fiskal yang tinggi, jika dibiayai melalui pinjaman atau pencetakan uang, dapat meningkatkan jumlah uang beredar di ekonomi. Peningkatan ini sering kali meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga mendorong kenaikan inflasi.

##### 2) Peningkatan Utang Pemerintah.

Untuk membiayai defisit, pemerintah sering kali mengambil utang, baik dari dalam maupun luar negeri. Jika utang tersebut terlalu besar dan sulit dibayar, investor mungkin kehilangan kepercayaan, yang bisa memicu pelemahan nilai tukar. Pelemahan nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya impor, yang pada gilirannya mendorong inflasi.

##### 3) Kebijakan Moneter yang Lebih Ketat.

Bank Indonesia mungkin merespons defisit fiskal dan inflasi yang meningkat dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, suku bunga yang lebih tinggi bisa menekan pertumbuhan ekonomi.

Secara historis, di Indonesia defisit fiskal yang tidak dikelola dengan baik sering berkontribusi terhadap inflasi yang lebih tinggi, terutama melalui peningkatan jumlah uang beredar dan pelemahan nilai tukar. Namun, kebijakan fiskal yang disiplin dan terkoordinasi dengan kebijakan moneter dapat membantu meminimalkan dampak inflasi dari defisit fiskal.

Kebijakan defisit merupakan kebijakan fiskal ekspansif yang ditempuh pemerintah dalam rangka menstimulasi perekonomian dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, esensi kebijakan defisit merupakan upaya untuk menjaga momentum dan mendorong agar peran APBN dalam menstimulasi perekonomian dapat berfungsi secara optimal. Perkembangan defisit APBN dalam 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa defisit bergerak dinamis namun secara umum tetap terkendali dalam batas aman. Pada sisi lain defisit yang terarah dan terukur tersebut merefleksikan bahwa arah kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah masih tetap ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi dan berkelanjutan. Dalam periode 1998 sampai dengan 2018, Pemerintah cenderung melakukan konsolidasi fiskal. Sementara dalam periode 2009 sampai dengan 2015, lebih memperkuat stimulus dan selanjutnya mulai 2016 sampai dengan 2018 kembali pemerintah melakukan konsolidasi fiskal dalam rangka penguatan kredibilitas fiskal, namun tetap menjaga agar peran APBN dalam menstimulasi perekonomian tetap berfungsi optimal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit nasional dibatasi sebesar 3 persen dari PDB. Berdasarkan kebijakan defisit APBN tersebut, defisit nasional pada tahun 2014 diperkirakan masih dalam batas yang terkendali, dibawah 3 persen. Apabila dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah keatas, defisit APBN Indonesia juga masih pada level yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan APBN Indonesia dilakukan dengan *prudent* dalam rangka menjaga *fiscal sustainability*, yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan diperlukan ruang fiskal yang cukup memadai, namun apabila pendapatan negara belum sepenuhnya memadai untuk menopang belanja negara tersebut, pemerintah dimungkinkan untuk mencari sumber pembiayaan utang, sepanjang dikelola secara produktif dan *prudent*. Hal tersebut memberi penekanan bahwa utang mungkin untuk dilakukan sepanjang digunakan untuk kegiatan produktif (*golden rule*), terkendali dan efisien.

### **c. Hubungan Defisit Fiskal Terhadap Inflasi di Indonesia**

Inflasi yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah terus ditingkatkan. Pemerintah dengan sengaja membuat defisit APBN (dimana pengeluaran lebih besar dari penerimaan) guna memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdampak pada inflasi dari sisi permintaan. Dengan besarnya pengeluaran pemerintah (misalnya belanja barang guna menambah prasarana masyarakat) maka permintaan barang di perekonomian meningkat. Namun hal ini tidak diikuti dengan penambahan penawaran barang yang ada. Ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan kenaikan harga barang yang berarti laju inflasi meningkat.

Dengan laju inflasi yang tinggi maka pemerintah akan memberikan subsidi kepada masyarakat dan memberikan proteksi pada industri tertentu tidak dapat bertahan menghadapi persaingan. Dampaknya adalah pengeluaran pemerintah semakin membengkak dan defisit semakin besar sehingga pada jangka panjang akan semakin meningkatkan laju inflasi (Kay, 2003)

Sedangkan dari sisi penawaran inflasi dapat terjadi karena kenaikan biaya produksi. Dengan meningkatnya harga barang maka para pekerja akan menuntut kenaikan gaji dan upah. Kenaikan gaji dan upah ini akan menaikkan biaya produksi. Dengan naiknya biaya

produksi maka harga barang akan naik pula sehingga laju inflasi kembali meningkat.

Inflasi selain dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi. Hal ini terjadi pada pertengahan tahun 1997. Pada pertengahan tahun 1997 terjadi gejolak politik, sosial, budaya dan keamanan. Pada tahun 1997 dan 1998 krisis moneter yang terjadi telah berkembang menjadi krisis multi dimensional yang melemahkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Pada periode tersebut telah terjadi aksi reformasi yang disertai dengan aksi penjarahan, pengrusakan, kesuruhan secara besar-besaran. Dengan situasi yang kacau tersebut banyak investor asing yang menarik dananya dari Indonesia. Dengan banyaknya investor yang menarik dananya dari Indonesia maka nilai tukar Rupiah terhadap Dollar melemah. Hal ini berakibat pada hutang yang semakin membengkak. Hutang ini membebani APBN tahun berikutnya. Dengan besarnya hutang tersebut maka defisit APBN semakin besar juga.

Dalam rangka membiayai defisit APBN-nya, pemerintah mempunyai dua pilihan sumber pembiayaan. Pertama yaitu meminjam dari masyarakat dalam bentuk obligasi dan yang kedua meminjam dari bank sentral. Namun setelah keluarnya peraturan independensi Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bahwa BI dilarang memberikan pinjaman pada pemerintah baik dengan alasan apapun maka sumber pembiayaan defisit pemerintah hanyalah dari meminjam dari masyarakat.

Kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran pemerintah akan berimplikasi pada kegiatan ekonomi dan harga, baik defisit tersebut dibiayai dengan meminjam dari masyarakat maupun dari bank sentral. Efek kebijakan fiskal dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak dapat mengerem laju defisit APBN dan efeknya pada perekonomian bersifat kontraktif. Sebaliknya jika pemerintah menambah pengeluarannya maka defisit APBN akan

semakin membengkak dan efeknya pada perekonomian bersifat ekspansif (Roswita, 2001).

## **B. Penelitian Yang Relevan**

1. Marta Elvina, Sri Purnami dan Athina Wulandari (2021) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M1) dan Suku Bunga BI (*BI Rate*) Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia”

Penelitian ini sama sama membahas tentang inflasi, yaitu pengaruh jumlah uang beredar dan *BI Rate* terhadap inflasi Di Indonesia. Perbedaannya terletak pada jenis penlitian, penelitian ini menggunakan metode Studi Literatur atau disebut juga penelitian yang dilakukan dengan cara mencari referensi atas landasan teori yang relevan.

Hasil Penelitian ini secara simultan memperlihatkan bahwa Jumlah uang beredar dan suku bunga (*BI Rate*) dapat mempengaruhi dan bersifat signifikan pada inflasi yang ada diindonesia. Secara parsial memperlihatkan bahwa Jumlah uang beredar dapat mempengaruhi secara negatif dan bersifat signifikan terhadap inflasi. Sedangkan secara parsial suku bunga *BI Rate* dapat mempengaruhi secara positif dan bersifat signifikan pada inflasi di Indonesia

2. Dwi Puspita Sari (2021) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Kurs Dan Suku Bunga Bank Indonesia Dengan Jumlah Uang Beredar, Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia”. Dengan Tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh tingkat kurs, perubahan suku bunga Bank Indonesia serta jumlah uang yang beredar terhadap tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah variabel tingkat kurs di Indonesia memiliki nilai positif terhadap inflasi serta tidak signifikan terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kurs rupiah terhadap nilai tukar US Dollar mengalami kenaikan. Untuk suku bunga bank Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia ini menunjukkan bahwa hasil temuan yang ada tidak sesuai

dengan teori yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa jika nilai Suku bunga BI mengalami peningkatan maka tingkat inflasi akan mengalami penurunan. Sedangkan pada variabel jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh yang negatif serta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Inflasi.

3. Jaka Sriyana (2022) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Fiscal and monetary policies to reduce inflation rate in Indonesia”. Penelitian ini menganalisis kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan laju inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model VECM untuk menganalisis model inflasi berdasarkan data tahunan dari tahun 1991-2020.

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan variabel fiskal dan moneter terhadap tingkat inflasi. Temuan ini mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter bersifat inflasioner. Secara khusus, pengeluaran pemerintah dan uang sempit berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan tingkat inflasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa dampak dari kebijakan tersebut telah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Studi ini juga menemukan bahwa defisit anggaran pemerintah tidak mempengaruhi tingkat harga domestik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa inflasi domestik terkait erat dengan sektor keuangan fiskal dan moneter

4. Karari Budi Prasasti dan Edy Juwono Slamet (2020) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi Dan Suku Bunga, Serta Terhadap Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. Dengan Tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh dari jumlah uang beredar terhadap variabel inflasi dan suku bunga, serta pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hasil pengujian ini menggunakan *eviews* menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hal tersebut dapat diamati dari tingkat probabilitas

sebesar 0,0256 lebih kecil dari Critical Value. Dari pengujian ini dihasilkan persamaan  $Y_1 = 1,395 + 2,93X_1 + e$ . Koefisien 1,395 menunjukkan apabila keadaan variabel lain dianggap tetap maka nilai inflasi sebesar 1,395%. Kenaikkan pada jumlah uang beredar sebesar 1% akan memicu kenaikan pada inflasi sebesar 2,93%. Sedangkan pengaruh dari jumlah uang beredar ke inflasi sebesar 60%. Ini dapat dilihat dari nilai R-square sebesar 0,60

Terdapat pengaruh signifikan jumlah uang beredar terhadap inflasi dan suku bunga. Secara parsial inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap investasi di Indonesia. Secara simultan inflasi dan suku bunga berpengaruh bersama-sama terhadap Investasi di Indonesia. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

5. Ayu Feranika, Dini Haryati (2020) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19”. Dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui strategi kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi pada perekonomian indonesia dalam menghadapi dampak virus covid 19.

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Data diperoleh melalui studi literatur, dengan membaca dan menelaah serta menganalisa berbagai literatur, baik berupa dokumen, jurnal, data publikasi dari kementerian keuangan maupun dari website resmi yang mengeluarkan informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian. Sementara analisa data dilakukan dengan melakukan reduksi, klasifikasi, pemaknaan hingga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan strategi kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam 3 stimulus. Pembiayaan-pembiayaan pemerintah dapat melakukan *refocusing/revisi* terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemic Covid-19. Selain itu, dengan kebijakan *new normal* baru-baru ini, diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan mengontrol pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil VECM variabel syariah dapat menurunkan laju inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel konvensional dapat menurunkan laju inflasi akan tetapi menahan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian berdasarkan hasil FEVD jalur konvensional lebih berpengaruh dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan masing-masing kontribusi sebesar 50,5% dan 19,97%, sedangkan jalur syariah masing-masing sebesar 29,07%. dan 19,47%.

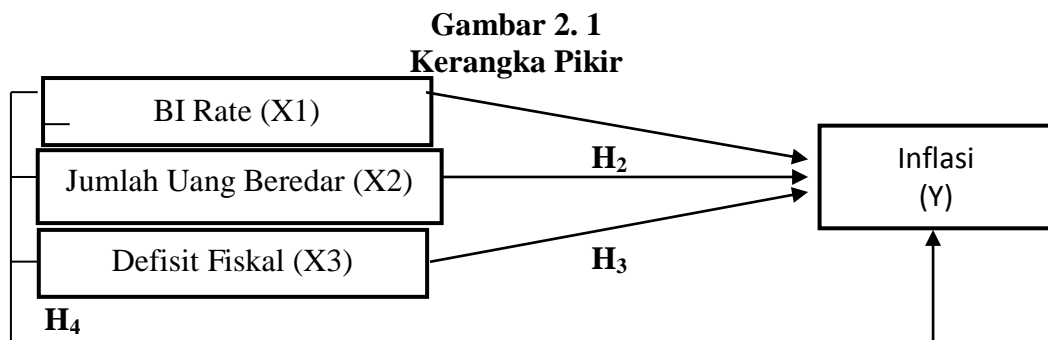
6. Nela Permata Sari Lubis (2022) “Analisis Pengaruh JUB, *E-Money* dan BI7DRR Terhadap Inflasi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh JUB, *E-Money* dan BI7DRR secara simultan dan parsial terhadap inflasi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini sama sama membahas tentang pengaruh jumlah uang beredar dan *BI Rate* terhadap inflasi yaitu “Analisis Pengaruh JUB, *E-Money* dan BI7DRR Terhadap Inflasi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”. Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia, *e money* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia,

BI7DRR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia Jumlah Uang Beredar, E-Money, dan BI7DRR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.

### C. Kerangka Berpikir



Sumber : Data diolah, 2024

### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maksud dari hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H<sub>0</sub><sub>1</sub> : Tidak terdapat pengaruh BI Rate terhadap Inflasi di Indonesia.  
 Ha<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh BI Rate terhadap Inflasi di Indonesia.  
 H<sub>0</sub><sub>2</sub> : Tidak terdapat pengaruh jumlah uang beredar terhadap Inflasi di Indonesia.  
 Ha<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh jumlah uang beredar terhadap Inflasi di Indonesia.  
 H<sub>0</sub><sub>3</sub> : Tidak terdapat pengaruh defisit fiskal terhadap Inflasi di Indonesia.  
 Ha<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh defisit fiskal terhadap Inflasi di Indonesia.  
 H<sub>0</sub><sub>4</sub> : Secara simultan tidak terdapat pengaruh *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal secara simultan terhadap inflasi di Indonesia.  
 Ha<sub>4</sub> : Secara simultan terdapat pengaruh *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal terhadap inflasi di Indonesia.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif ini melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang pendapat orang atas sebuah isu atau topik. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi hubungan antar variabel.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah dimana peneliti melakukan penelitian ini yaitu di negara Indonesia. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2024 sampai Januari 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 1  
Waktu Penelitian**

No	Uraian kegiatan	2024								2025
		Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1	Survey awal									
2	Pengajuan proposal									
3	Bimbingan proposal									
4	Seminar porposal									
5	Revisi Proposal									
6	Bimbingan skripsi									
7	Pengolahan data penelitian									
8	Munaqasyah									

Sumber : *Olahan peneliti*

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber yang diambil secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang digunakan disebut dengan data sekunder. Data sekunder adalah data berupa publikasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan data sekunder ini diperoleh melalui kepustakaan berupa jurnal, artikel maupun dari hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan penulis adalah data *BI Rate* Jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal tahun 2012-2021 yang diperoleh dari Bank Indonesia dan World Bank.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Data tersebut di akses melalui situs web resmi Bank Indonesia dan World Bank.

### **E. Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Proses ini menggunakan perangkat lunak *SPSS Statistics 25* untuk melakukan analisis kuantitatif. Tujuan dari analisis kuantitatif ini adalah untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

#### **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah:

- a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian dan sebaliknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode *kolmogrov-smirnow* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Jika hasil *Kolmograv-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas  $\alpha = 0,05$  maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmograv-Smirnow* menunjukkan nilai signifikan dibawah  $\alpha = 0,05$  maka data residual terdistribusi tidak normal. Dengan menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 26 for windows (Sujarweni, 2015)

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedasitas dapat dilakukan dengan metode uji glejser. Uji glejser merupakan pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dengan menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 26 for windows (Setiawati, 2021:1585)

c. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Multikolinearitas dapat melihat menilai tolerance dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai *VIF*  $< 10$  maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tidak terjadi multikolinearitas. Dengan menggunakan bantuan

*Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26 for windows.*  
(Rizky,2018:148)

d. Uji Auto Korelasi

Autokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (data time series) maupun tersusun dalam rangkaian ruang atau disebut data cross sectional. Salah satu pengujian yang umum digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah uji statistik Uji Durbin Watson (DW). Nilai Durbin Watson hitung yang akan dibandingkan dengan nilai DW, 51 baik nilai Durbin Upper (DU) maupun nilai Durbin Lower (DL). Cara menentukan kriteria pengujian autokorelasi berdasarkan nilai DW adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $DW < DL$  atau  $DW > 4-DL$ , yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika  $DU < DW < 4-DU$ , yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
- 3) Jika  $DL < DW < DU$  atau  $4-DU < DW < 4-DL$ , maka tidak mendapatkan kesimpulan yang berarti.

## 2. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis Pengaruh *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar Dan Defisit Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia, dapat menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen (Inflasi)

X1 : Variabel independen pertama (*BI Rate*)

X2 : Variabel independen kedua (JumlahUangBeredar)

X3 : Variabel independen ketiga (Defisit Fiskal)

$\alpha$  : Konstanta (*intersep*)

$\beta_1$  : Koefisien regresi variabel X1

$\beta_2$  : Koefisien regresi variabel X2

$\beta_3$  : Koefisien regresi variabel X3

e : Galat atau *error*

### 3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan ukuran untuk mengetahui persentase kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Koefisien regresi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika dalam uji empiris di dapat nilai adjusted R<sup>2</sup> negatif, maka nilai adjusted R<sup>2</sup> dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R<sup>2</sup>= 1, maka adjusted R<sup>2</sup>=R<sup>2</sup>= 1, sedangkan jika nilai R<sup>2</sup> = 0, maka adjusted R<sup>2</sup> = (1 -k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R<sup>2</sup> akan bernilai positif. Dengan menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26 for windows*. (Ghozali, 2013)

### 4. Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini yaitu apakah variabel JumlahUangBeredar, *BI Rate*, Defisit Fiskal signifikan terhadap inflasi dengan menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26 for windows*. Langkah-langkah dalam Uji T adalah sebagai berikut :

- 1) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$  maka menerima hipotesis nol (H<sub>0</sub>) artinya variabel *BI Rate*, jumlahuangberedar, dan defisit fiskal tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.
- 2) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$  maka menolak hipotesis nol (H<sub>0</sub>) dan menerima hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>), maka secara parsial dapat dibuktikan bahwa semua variabel bebas jumlahuangberedar, *BI Rate*, defisit fiskal berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.
- 3) Jika probabilitas ( $\text{sig } t$ ) >  $\alpha = (0,05)$  maka H<sub>0</sub> diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sedangkan jika probabilitas ( $\text{sig } t$ )  $< \alpha = (0,05)$  maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan merupakan pengujian terhadap koefisien regresi, untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan yaitu jumlah uang beredar di moderasi oleh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 26 For Windows. Dengan menggunakan kriteria penilaian yaitu :

- 1)  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak bila  $F$  hitung  $< F$  tabel dan atau  $\text{Sig} > 0,05$ .
- 2)  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima bila  $F$  dihitung  $> F$  tabel dan atau  $\text{Sig} < 0,05$ .

(Sulityo Dan Rita, 2002)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Indonesia

Peta Kondisi Geografis Negara Indonesia



Gambar 4. 1  
Peta Kondisi Geografis Indonesia

Secara astronomis, Indonesia terletak diantara  $6^{\circ}04'30''$  Lintang Utara dan  $11^{\circ}00'36''$  Lintang Selatan dan diantara  $94^{\circ}58'21''$  sampai dengan  $114^{\circ}01'36''$  Bujur Timur dan dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0.

Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga terletak diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia berada pada posisi silang jalur persimpangan lalu lintas dunia, sehingga sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian negara Indonesia.

Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas sebagai berikut

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Palau dan Laut Cina Selatan.
2. Di sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik.
3. Di sebelah selatan berbatasan dengan Negara Australia, Timor Leste dan Samudra Hindia.
4. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Batas-batas tersebut pada pulau terluar yang perlu dijaga dan di kelola dengan baik, garis pangkal wilayah Negara Indonesia dengan negara lain (Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar). Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak dilima pulau besar dan empat pulau kecil, yaitu:

1. Pulau Sumatra terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat,
2. Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung. Kepulauan Riau terdiri dari Kepulauan Riau.
3. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pulau Jawa terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.
5. Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil) terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
6. Pulau Kalimantan terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
7. Pulau Sukawesu terdiri dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
8. Kepulauan Maluku Terdiri dari Maluku dan Maluku Utara.
9. Pulau Papua terdiri dari Papua dan Papua Barat.

## 2. Kondisi Demografis Indonesia

Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat didunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar.

Dua suku terbesar ini adalah suku Jawa (41% dari total populasi) dan suku Sunda (15% dari total populasi). Kedua suku ini berasal dari pulau Jawa, pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang mencakup 60% dari total populasi Indonesia. Jika digabung dengan pulau Sumatra, jumlahnya menjadi 80% total populasi. Ini adalah indikasi bahwa konsentrasi populasi terpenting berada di wilayah barat Indonesia. Provinsi paling padat adalah Jawa Barat (lebih dari 43 juta penduduk), sementara populasi paling sepi adalah provinsi Papua Barat di Wilayah Indonesia Timur (dengan populasi hanya sekitar 761.000 jiwa).

Mayoritas penduduk Indonesia dalam hal agama adalah menganut agama Islam, sekitar 87,2% dari jumlah total penduduk Indonesia atau 217,2 juta orang adalah beragama Islam. Namun, Indonesia bukan negara Islam (hanya di Aceh hukum syariah diterapkan). Tapi meskipun negaranya sebuah demokrasi yang sekuler, prinsip-prinsip yang berdasarkan doktrin Islam memainkan peran penting dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat Indonesia. Ada juga sekitar 16,5 juta orang protestan (6,9% dari jumlah total penduduk Indonesia), 6,9 juta umat katolik (2,9% dari populasi), dan 4 juta beragama hindu (1,7%) yang tinggal di Indonesia terakhir, terdapat minoritas kecil dari umat Buddha serta mereka yang menganut konfusianisme, sebagian besar adalah masyarakat etnis Tionghoa. Bertentangan dengan kebanyakan

Negara di dunia Barat, bagi banyak orang Indonesia agama masih tetap merupakan bagian penting dari identitas mereka.

Sebagian besar wilayah Indonesia dihuni oleh penduduk dari berbagai etnis terbesar di Indonesia sebagai berikut Jawa 42,65%, Sunda 15,41%, Malay 3,45%, Madura 3,37%, Batak 3,02%, Minangkabau 2,51%, Betawi 2,49%, Bugis 2,49%, Banten 2,05%, Banjar 1,74% dan berbagai suku lainnya.

Sebagian besar negara di dunia fokus pada pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan, namun akhir-akhir ini terjadi perubahan pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu melibatkan faktor demografi. Faktor demografi yang menjadi pertimbangan yang cukup penting adalah struktur umur, angkatan kerja, jumlah penduduk serta angka harapan hidup masyarakat. Banyaknya penduduk dengan usia muda akan menciptakan beban ekonomi yang tinggi, tetapi disisi lain sebagai sumber potensial tenaga kerja, demikian juga dengan usia tua.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum menguji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik untuk memverifikasi apakah model regresi dapat diterima secara ekonometrika. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji, multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji auto korelasi

#### **a. Uji Normalitas**

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dan dapat diteliti adalah model regresi yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikan  $> \alpha = 0,05$  namun jika nilai signifikan  $< \alpha = 0,05$  artinya data yang digunakan ber distribusi tidak normal. Untuk menguji normalitas

dalam penelitian ini menggunakan *one sample kolmogrov-smirnov*. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,74507143
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,076
	Negative	-,090
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Data yang digunakan dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal yaitu variabel *BI Rate* (X1) variabel Jumlah Uang Beredar (X2) dan variabel Defisit Fiskal (X3) terhadap variabel Inflasi (Y), kemudian bisa dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0.200 artinya nilai ini lebih besar dari derajat kesalahan  $\alpha = 0.05$  (5%).

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan kepengamatan lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan uji gletser, dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas, namun sebaliknya jika nilai signifikansi  $< 0,05$

maka dapat disimpulkan terjadi masalah Heteroskedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 2**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7066788.113	2056549.150		3.436	.002
X <sup>1</sup> (BI Rate)	-.297	.191	-.294	-1.554	.132
X <sub>2</sub> (jumlah uang beredar)	-.320	.410	-.145	-.780	.442
X <sub>3</sub> (Defisit Fiskal)	-312547.083	197259.679	-.304	-1.584	.125

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig X1 = 0.132 > 0.05, nilai sig X2 = 0.442 > 0.05 dan nilai sig X3 = 0,125 > 0,05. Artinya dalam penelitian ini variabel *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

### c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonearitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terdapat interkorelasi atau kolinearitas antar variabel independent. Interkorelasi merupakan hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya di dalam suatu model regresi. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 3**  
**Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X <sub>1</sub> (BI Rate)	,562	1,779
	X <sub>2</sub> (Jumlah Uang Beredar)	,432	2,316
	X <sub>3</sub> (Defisit Fiskal)	,703	1,422

Uji multikolinearitas yang baik dalam suatu model regresi adalah tidak terdapat multikolinearitas. Pedoman dalam menentukan uji multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance Value*. Jika nilai VIF  $< 10$  dan nilai Tolerance  $> 0.1$  artinya tidak terdapat multikolinearitas.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai VIF variabel independent X1 =  $1,779 < 10$  dan nilai Tolerance =  $0.562 > 0.1$ . Maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

Nilai VIF variabel independent X2 =  $2,316 < 10$  dan nilai tolerance =  $0,432 > 0,1$ . Maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terdapat multikolineralitas.

Nilai VIF variabel independent X3 =  $1,422 < 10$  dan nilai tolerance =  $0,703 > 0,1$ . Maka dapat disimpulkan dalam modell regresi ini tidak terdapat multikolineralitas.

#### d. Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pada periode t (tahun sekarang) dengan t-1 (tahun sebelumnya), jika ada maka dinamakan terdapat problem korelasi. Gejala autokorelasi ini dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Tabel uji autokorelasi untuk penelitian ini dapat ditemukan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Auto Korelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.445 <sup>a</sup>	.198	.101	1.28069	1.747

a. Predictors: (Constant), LN\_X3, LN\_X2, LN\_X1

b. Dependent Variable: LN\_Y

Unt Untuk  $k = 3$  dan  $n = 30$ , demean  $\alpha = 5\%$  diperoleh nilai DL = 1.213, DU = 1.649, dan DW = 1.747. Uji penelitian yang baik dalam

penelitian adalah tidak terdapat masalah autokorelasi. Jika  $DU < DW$  dan nilai  $DW < 4-DU$  maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi. Dengan menggunakan bantuan Durbin Watson dapat diketahui nilai  $DU (1.649) < DW (1.747)$  dan  $DW (1.747) < 4-DU (2,351)$  artinya tidak terdapat masalah autokorelasi.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (Uji T) merupakan uji yang bertujuan untuk menunjukkan mengenai seberapa jauh pengaruh suatu variabel independent yakni, *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal secara individual untuk menerangkan variasi variabel dependent yaitu Inflasi Di Indonesia, apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent atau tidak.

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37,272	11,634		3,204	,004
	X <sub>1</sub> (BI Rate)	-3,623	,488	-,900	-7,421	,000
	X <sub>2</sub> (Jumlah Uang Beredar)	-,237	,215	-,152	-1,099	,282
	X <sub>3</sub> (Defisit Fiskal)	-3,493E-6	,000	-,306	-2,825	,009

a. Dependent Variable: Inflasi

Uji parsial (Uji Statistik T) bertujuan untuk menguji masing-masing variabel independen yaitu *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal secara parsial apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Inflasi) atau tidak. Untuk mencari pada Uji Statistik T nilai signifikan  $< \alpha = 0.05$  dan nilai T-hitung  $> t$ -tabel. Hasil uji

analisis regresi coefficients dengan menggunakan SPSS versi 26 terlihat pada bagian di bawah ini :

1) *BI Rate* terhadap Inflasi Di Indonesia

Berdasarkan hasil uji T, menunjukkan nilai signifikansi *BI Rate* terhadap Inflasi adalah 0,000 yang lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0.05$ . Berarti *BI Rate* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia. Dengan demikian  $H_01$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima.

2) Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi Di Indonesia

Berdasarkan hasil uji T menunjukkan nilai jumlah uang beredar terhadap Inflasi adalah 0,282, yang lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Berarti Jumlah Uang Beredar secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia. Dengan demikian,  $H_02$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak.

3) Defisit Fiskal terhadap Inflasi Di Indonesia

Berdasarkan hasil uji T menunjukkan nilai Defisit Fiskal terhadap Inflasi adalah 0.009. yang lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$ . Berarti Defisit Fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia. Dengan demikian,  $H_03$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima.

**b. Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2384,261	3	794,754	31,646	,000 <sup>b</sup>
	Residual	652,955	26	25,114		
	Total	3037,217	29			
a. Dependent Variable: Inflasi						
b. Predictors: (Constant), Defisit Fiskal , <i>BI Rate</i> , Jumlah Uang Beredar						

Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapat dari tabel dapat disimpulkan bahwa *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal

secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu Inflasi.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh seluruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari pada nilai signifikan 0.05 dengan nilai F hitung 31,646 lebih besar dari pada nilai F tabel senilai 2.975. Maka dapat disimpulkan hasilnya adalah signifikan, artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi. Artinya jika terjadi kenaikan terhadap *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal, maka Inflasi juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4. 7**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37,272	11,634		3,204	,004
	X <sub>1</sub> (BI Rate)	-3,623	,488	-,900	-7,421	,000
	X <sub>2</sub> (Jumlah Uang Beredar)	-,237	,215	-,152	-1,099	,282
	X <sub>3</sub> (Defisit Fiskal)	-3,493	,000	-,306	-2,825	,009

a. Dependent Variable: Inflasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai konstanta sebesar 32,272 dan untuk nilai X<sub>1</sub> sebesar -3,623 nilai X<sub>2</sub> sebesar -0,237 dan nilai X<sub>3</sub> sebesar -3,493. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 37,272 - 3,632X_1 - 0,237X_2 - 3,493X_3 + e$$

Keterangan :

- a. Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai C sebesar 37,272 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel inflasi belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel *BI Rate* ( $X_1$ ), variabel jumlah uang beredar ( $X_2$ ) dan variabel defisit fiskal ( $X_3$ ) semuanya bernilai nol, maka Inflasi adalah 37,272.
- b. Untuk nilai koefisien regresi ( $X_1$ ) bernilai negatif sebesar -3,632, jika  $X_1$  meningkat sebesar 1% maka menyebabkan penurunan terhadap Y sebesar -3,632 maka bisa diartikan bahwa variabel *BI rate* ( $X_1$ ) meningkat maka variabel inflasi (Y) akan menurun sebesar -3,632 dan begitu juga sebaliknya.
- c. Untuk nilai koefisien regresi ( $X_2$ ) bernilai negatif sebesar -0,237, jika  $X_2$  naik sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan sebesar -0,237. Maka bisa diartikan bahwa variabel jumlah uang beredar ( $X_2$ ) meningkat maka variabel inflasi (Y) akan menurun sebesar -0,237 dan begitu juga sebaliknya.
- d. Untuk nilai koefisien regresi ( $X_3$ ) bernilai negatif sebesar -3,493, jika  $X_3$  naik sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan sebesar -3,493. Maka bisa diartikan bahwa variabel defisit fiskal ( $X_3$ ) meningkat maka variabel inflasi (Y) juga akan meningkat sebesar -3,493 dan begitu juga sebaliknya.
- 4. Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Uji Koefisien determinasi atau Adjusted  $R^2$  merupakan uji yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan dari variabel independent yaitu *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal dalam menjelaskan variabel dependennya yaitu Inflasi di Indonesia

**Tabel 4. 8**  
**Uji Koefisien Determinan**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,886 <sup>a</sup>	,785	,760	5,011

a. Predictors: (Constant), Defisit Fiskal , BI Rate , Jumlah Uang Beredar

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang telah dilakukan yang terlihat pada tabel nilai R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,785. Ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independent secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependennya sebesar 78,5%, sedangkan sisanya yaitu 21,5% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### C. Pembahasan Penelitian

#### 1. Pengaruh *BI Rate* terhadap Inflasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji statistik T. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap Inflasi. Hal tersebut diketahui dari tingkat signifikan dari *BI Rate* sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti *BI Rate* berpengaruh signifikan. Hal ini berarti secara parsial *BI Rate* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Inflasi.

Hal tersebut tidak sejalan dengan hipotesis nol dan hasil tersebut selaras dengan penelitian terdahulu dari Dwi Puspita Sari (2021). Dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Tingkat Kurs Dan Suku Bunga Bank Indonesia Dengan Jumlah Uang Beredar, Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia”. Menunjukkan hasil bahwa variabel tingkat kurs di Indonesia memiliki nilai positif terhadap inflasi serta tidak signifikan terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kurs rupiah terhadap nilai tukar Us Dollar mengalami kenaikan. Untuk variabel suku bunga bank Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia ini menunjukkan bahwa hasil temuan yang ada tidak sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa jika nilai Suku bunga BI mengalami peningkatan maka tingkat inflasi akan mengalami penurunan.

Sedangkan pada variabel Jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh yang negatif serta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Inflasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marta Elvina, Sri Purnami dan Athina Wulandari (2021) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M1) dan Suku Bunga BI (*BI Rate*) Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia”. Hasil Penelitian ini secara simultan memperlihatkan bahwa Jumlah uang beredar dan suku bunga (*BI Rate*) dapat mempengaruhi dan bersifat signifikan pada inflasi yang ada di Indonesia. Secara parsial memperlihatkan bahwa Jumlah uang beredar dapat mempengaruhi secara negatif dan bersifat signifikan terhadap inflasi. Sedangkan secara parsial suku bunga *BI Rate* dapat mempengaruhi secara positif dan bersifat signifikan pada inflasi di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jaka Sriyana (2022) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Fiscal and monetary policies to reduce inflation rate in Indonesia”, sejalan dengan penelitian ini karena hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh signifikan variabel fiskal dan moneter terhadap tingkat inflasi. Temuan ini mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter bersifat inflasioner. Secara khusus, pengeluaran pemerintah dan uang sempit berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan tingkat inflasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa dampak dari kebijakan tersebut telah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Studi ini juga menemukan bahwa defisit anggaran pemerintah tidak mempengaruhi tingkat harga domestik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa inflasi domestik terkait erat dengan sektor keuangan fiskal dan moneter.

Penelitian yang dilakukan oleh Karari Budi Prasasti dan Edy Juwono Slamet (2020) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengaruh

Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi Dan Suku Bunga, Serta Terhadap Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, sejalan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan jumlah uang beredar terhadap inflasi dan suku bunga. Secara parsial inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap investasi di Indonesia. Secara simultan inflasi dan suku bunga berpengaruh bersama-sama terhadap Investasi di Indonesia.

Menurut Ekspektasi Inflasi menyatakan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di masa depan akan mempengaruhi perilaku mereka saat ini. Jika *BI Rate* mengalami kenaikan akan menunjukkan komitmen BI untuk menjaga stabilitas harga dan mengurangi ekspektasi inflasi masyarakat, sehingga mereka tidak akan menaikkan harga secara agresif.

Sebaliknya Jika *BI Rate* mengalami penurunan dapat meningkatkan ekspektasi inflasi jika masyarakat khawatir kebijakan ini akan memicu tekanan inflasi di masa depan.

## **2. Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji statistik T. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Jumlah Uang Beredar berpengaruh signifikan terhadap Inflasi. Hal tersebut diketahui dari tingkat signifikan dari Jumlah Uang Beredar sebesar  $0,282 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berarti Jumlah Uang Beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Hal ini berarti secara parsial Jumlah Uang Beredar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Inflasi.

Hal tersebut tidak sejalan dengan hipotesis nol dengan penelitian terdahulu dari Karari Budi Prasasti dan Edy Juwono Slamet (2020) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi Dan Suku Bunga, serta Terhadap Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan jumlah uang beredar terhadap inflasi dan suku bunga. Secara parsial inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap investasi di Indonesia. Secara simultan inflasi dan suku bunga berpengaruh bersama-sama terhadap Investasi di Indonesia. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara, sehingga dalam mengambil suatu kebijakan moneter haruslah tepat mengingat dampaknya yang begitu luas dalam suatu perekonomian.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marta Elvina, Sri Purnami dan Athina Wulandari (2021) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M1) dan Suku Bunga BI (*BI Rate*) Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia”. Hasil Penelitian ini secara simultan memperlihatkan bahwa Jumlah uang beredar dan suku bunga (*BI Rate*) dapat mempengaruhi dan bersifat signifikan pada inflasi yang ada di Indonesia. Secara parsial memperlihatkan bahwa Jumlah uang beredar dapat mempengaruhi secara negatif dan bersifat signifikan terhadap inflasi. Sedangkan secara parsial suku bunga *BI Rate* dapat mempengaruhi secara positif dan bersifat signifikan pada inflasi di Indonesia

Menurut Keynesian, inflasi akan terjadi saat permintaan barang lebih besar daripada stok barang yang tersedia. Inflasi dorongan biaya terjadi ketika harga input untuk barang cenderung naik. Hal ini bisa terjadi karena jumlah uang beredar yang lebih besar pada tingkat yang lebih cepat dari pada perubahan preferensi konsumen. Tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi secara konsisten akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan tingkat

pertumbuhan jumlah uang beredar yang rendah akan menyebabkan inflasi yang rendah.

Menurut teori ekonomi klasik menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang beredar cenderung menyebabkan inflasi jika pertumbuhan jumlah uang beredar melebihi pertumbuhan output ekonomi. Ketika lebih banyak uang beredar dalam perekonomian, daya beli masyarakat meningkat, yang dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, menyebabkan kenaikan harga.

### **3. Pengaruh Defisit Fiskal Terhadap Inflasi**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji statistik T. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Defisit Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi. Hal tersebut diketahui dari tingkat signifikan dari Defisit Fiskal sebesar  $0.009 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berarti Defisit Fiskal tidak berpengaruh signifikan. Hal ini berarti secara parsial Defisit Fiskal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Inflasi.

Dalam hal inipenelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis nol dengan penelitian terdahulu dari Jaka Sriyana (2022) dalam bentuk jurnal yang berjudul “*Fiscal and monetary policies to reduceinflation rate in Indonesia*”. Dengan hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan variabel fiskal dan moneter terhadap tingkat inflasi. Temuan ini mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter bersifat inflasioner. Secara khusus, pengeluaran pemerintah dan uang sempit berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan tingkat inflasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa dampak dari kebijakan tersebut telah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Studi ini juga menemukan bahwa defisit anggaran pemerintah tidak mempengaruhi tingkat harga domestik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa inflasi

domestik berkaitan erat dengan sektor keuangan fiskal dan moneter.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis nol dengan penelitian terdahulu dari Ayu Feranika, Dini Haryati (2020) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19”. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan strategi kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam 3 stimulus. Pembiayaan-pembiayaan pemerintah dapat melakukan *refocusing*/revisi terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemi Covid-19. Dengan kebijakan *new normal* baru-baru ini, diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan mengontrol pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori menurut mazhab Neoklasik, kebijakan ekspansif dalam bentuk defisit fiskal cenderung merugikan perekonomian karena akan menurunkan investasi swasta, terutama ketika terjadi defisit fiskal yang terus meningkat. Kebijakan defisit yang ditempuh dengan menurunkan tarif pajak akan meningkatkan suku bunga dan menurunkan investasi, sehingga berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kebijakan ekspansif cenderung menyebabkan inflasi, sehingga dapat menaikkan suku bunga yang lalu akan mengurangi investasi dan melambatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun secara historis, defisit fiskal yang tidak dikelola dengan baik sering berkontribusi terhadap inflasi yang lebih tinggi, terutama melalui peningkatan jumlah uang beredar dan pelemahan nilai tukar. Kebijakan fiskal yang disiplin dan terkoordinasi dengan

kebijakan moneter dapat membantu meminimalkan dampak inflasi dari defisit fiskal.

#### **4. Pengaruh *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar dan Defisit fiskal terhadap Inflasi Di Indonesia**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji  $f$  menunjukkan bahwa nilai signifikan *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Inflasi, sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari pada nilai signifikan 0.05 dengan nilai  $f$  hitung 31,646 lebih besar dari pada nilai  $f$  tabel senilai 2.975. Maka dapat disimpulkan hasilnya adalah signifikan, artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi. Artinya jika terjadi kenaikan terhadap *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal, maka Inflasi juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nela Permata Sari Lubis (2022) yang berjudul “Analisis Pengaruh JUB, *E-Money* dan BI7DRR Terhadap Inflasi Di Indonesia Pada Masa Pandemic Covid-19”. Dengan hasil penelitian menunjukkan pengujian secara simultan antara variabel bebas (Jumlah Uang Beredar, dan BRT) terhadap variabel terikat (inflasi) sebesar 3,335 berpengaruh secara positif dan signifikan ( $0,001 < 0,05$ ). Jumlah uang beredar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia, *e money* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia, BI7DRR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Jumlah Uang Beredar, *E-Money*, dan BI7DRR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal di Indonesia dibuktikan dengan hasil sebagai berikut :

1. *BI Rate* secara parsial atau individual berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia tahun 1994-2023, Berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga pada saat *BI rate* meningkat maka inflasi akan menurun.
2. Jumlah Uang Beredar secara parsial atau individual tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia tahun 1994-2023. Berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga pada saat jumlah uang beredar meningkat maka inflasi juga akan meningkat.
3. Defisit Fiskal secara parsial atau individual berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia tahun 1994-2023. Berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga pada saat defisit fiskal meningkat maka inflasi juga akan meningkat.
4. *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar dan Defisit Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia tahun 1994-2023, hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian apabila *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal meningkat secara bersama-sama, maka inflasi di Indonesia juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan masukan atau saran bagi pihak terkait yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia agar mengontrol *BI Rate* agar tingkat inflasi tidak terlalu meningkat, karena apabila *BI Rate* turun maka inflasi akan mengalami kenaikan.

2. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperhatikan laju jumlah uang beredar agar tingkat inflasi di Indonesia menurun, karena apabila jumlah uang beredar meningkat, maka inflasi juga akan meningkat.
3. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengurangi defisit fiskal agar tingkat inflasi di Indonesia menurun, karena apabila defisit fiskal meningkat, maka inflasi juga akan meningkat.
4. Untuk peneliti selanjutnya khususnya mengenai *BI Rate*, jumlah uang beredar dan defisit fiskal, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel lain yang belum digunakan pada penelitian ini, yaitu *BI rate*, jumlah uang beredar dan Defisit fiskal. Diharapkan juga agar menggunakan data dan waktu penelitian yang lebih panjang dengan data yang terbaru agar menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan untuk menambah serta memperkaya pengetahuan bagi pembaca dan peneliti yang akan datang.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- AB, Roswita; *Ekonomi Moneter-Teori, Masalah dan Kebijakan*; Penerbit Universitas Sriwijaya; 2001
- Adim, A. (2021). *Pengaruh Uang Beredar dan Nilai Tukar Rupiah (KRUS) Terhadap Inflasi (Periode Januari 2015-Desember 2019)*. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(I), 58.
- Agnes Theresia Dabukke, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) Dan Harga Minyak Dunia Terhadap Inflasi Di Indonesia," *JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1 (2017)
- Agusmianata, N., Militina, T., & Lestari, D. (2018). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Inflasi di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 19(2), 188. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i2.2125>
- Akitoby, B. et al., 2004, *The Cyclical and Long-term Behavior of Government Expenditures in Developing Countries*, IMF Working Paper, WP/04/02.
- Baldacci, E., 2009
- Alvyonita, M., & Hidayat, P. (2017). Analisis Kausalitas Antara *BI Rate* Dengan Jumlah Uang Beredar Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(10), 623–633
- Amin, Nurul. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1.1 (2012): 69-98.
- Andi Muammar Qkhadafi, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Out Flow Peredaran Uang Rupiah Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Kritis*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2020)
- Anggara, W., Shawab, N., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2023). Economic Stability In Islamic View : Approach To Controlling Inflation. 1366–1372.
- Assa, R., Rotinsulu, T. O., & Mandej, D. (2020). Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode : 2006.1 – 2019-2. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 23–33
- Awang, M. H. (2016). *Economics Development Analysis Journal Determinan Permintaan Uang Di Indonesia Tahun 2005.Q1-2014.QIV: Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 163–169.

- Azimi, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2020. *Jurnal Produktivitas*, 8(1), 108–116.
- Aziz, K. F., & Yanto, R. (2023). Identifikasi Bi Rate, Indeks Harga Saham Komposit (IHSG), Uang Beredar Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, 9(2), 145-155.
- Azwar Karim, Adiwarmarman.2004. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bank Indonesia, “*Penjelasan BI Rate Sebagai Suku Bunga Acuan*”
- Baasir, Sarjoni, 2003, ” *Kamus Kimia* ”, edisi ke 2, P.T. Rineka Cipta, Jakarta
- Blanchard O. 2011. *Macroeconomics. Updated Edition: Fifth Edition*. Boston (US), Pearson
- Brilian, "Efektivitas Rezim Kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF) Terhadap Inflasi di Indonesia.," *Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis & Manajemen.* , (2020).
- Boediono, 1985, *Ekonomi Moneter seri sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Moneter No. 5, Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta
- Carare, A., & Stone, M. . (2003). *Inflation Targeting Regimes* (No. WP/03/9).
- Chandra, E. K., & Wahyuningsih, D. (2021a). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2011-2019. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(1), 37–54.
- Chandra, E. K., & Wahyuningsih, D. (2021). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2011-2019. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(1), 42.
- Daboussi, "Economic performance and inflation targeting indeveloping economies,"*Journal of World Economic Research*, (2014).
- Dabukke, A. T. (2017). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI RATE) Dan Harga Minyak Dunia Terhadap Inflasi Di Indonesia. *JOM Fekon*, 4(1), 757–767
- Darmawan, D. 2020. Analisis Pengaruh E-Money, Nilai Tukar, dan Suku Bunga terhadap Inflasi Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 9(1)

- Debelle, G., & Fischer, S. (1995). How Independent Should A Central Bank Be? In J. Fuhrer(Ed.), *Goals, Guidelines and Constraints Facing Monetary Policymakers* (pp. 195–221). Boston.
- Eachern diterjemahkan Triandaru Sigit. 2000. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat
- Eva Dayanti, dan Muhammad Nasir. 2016. Dampak Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Output dan Inflasi di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*.
- Efdiono. (2013). Analisis Dampak Defisit Fiskal terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Studi Kasus Tahun 1990–2011. Malang: Universitas Brawijaya
- Fahrika, A. I., & Roy, J.(2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di Indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213
- Fauzi, & Suhaidi, M. (2022). Pengaruh Defisit Fiskal , Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2019. 8(02), 2167–2182.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146-152.
- Ferdiansyah, F. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M1), Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Suku Bunga Deposito Terhadap Tingkat Inflasi. *Media Ekonomi*, 19(3), 43–68.
- Fleegler, E. (2006). *The twin deficits revisited: A cross-country, empirical approach* (Doctoral dissertation). Durham: Duke University
- Goodfriend, Marvin. “Using The Term Structure of Interest rate for Monetary Policy”, *Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly*, vol 84 (Summer 1998)
- Handayani, N. N. (2019). Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Inflasi Di Indonesia Periode 1999-2018. *Skripsi*.
- Herlambang, Ted, Sygiarto, Brastorodan Said Kelana (2001). “*Ekonomi Makro, teori analisis dan kebijakan*”. : PT Gramedia Puskata Utama. Jakarta

- Perlambang, Heru. "Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga sbi, nilai tukar terhadap tingkat inflasi." *Media Ekonomi* (2010): 49-68.
- Iffatunnisa, L., & Fisabilillah, L. W. P. (2024). Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 4(2), 23-30.
- James. 2018. Pengantar Ekonomi Makro: Makro.Edisi Pertama. Jakarta
- Kalalo, M Marmis, and Rotinsulu T.O, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Tahun 2000-20014," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 16, No. 01 (2016): hal. 706-717.
- Kalsum, U. 2017. Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara ; *Jurnal Ekonomi* Volume 13 Nomor 2,
- Kay, U. R. (2003). Uji-Kausalitas Hubungan Antara Harga Beras-Dan Tingkat Infsi Di Sumatera Selatan (Penerapan Uji Kausatitas Granger). *Jurnal EP UNSRI. Palembang*.
- Latumaerissa, J. R. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Luwahadi, N. L. G. A., & Arka, S. (2017). Determinan Jumlah Uang Beredar Dan Tingkat Inflasi Di Indonesia Periode 1984 - 2014. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(4), 533–563
- Mahendra, A. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Sbi Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 2(1), 1–12.
- Manihuruk, F. E., Silfani, D., Feby, Y., & Marbun, J. (2023). Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, dan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Terhadap Kurs Rupiah/USD. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 3(2), 118–129.
- Mankiw. Gregory. 2018. Makroekonomi. Erlangga. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makroekonomi. Edisi 4. Jakarta: Erlangga
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2008). Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia, Volume 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory. 2018. Teori Makro Ekonomi Terjemahan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2008). Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia, Volume 2. Jakarta: Salemba Empat
- Mbongo, James Ezekiel. Mutasa, Felician dan Robert Ebihart Msigwa. 2014. *The Effects of Money Supply on Inflation in Tanzania*. Science Publishing Group. Vol 3 (2): 19-26.
- Natsir. (2014). *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Mitra Wacana Media.
- Ningsih, S., & Kristiyanti, L. M. S. (2019). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia periode 2014-2016. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 20(2), 96-103.
- Nopirin. 2007. *Ekonomi Moneter*. BPFE I. Yogyakarta.
- Nopirin. 2014. *Ekonomi Moneter Buku II*. BPFE. Yogyakarta
- Nofinawati, "Pengaruh Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012-2017", *Jurnal Imara*, Vol. 2, No. 2
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 251
- Nurul Huda, et al., *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 176.
- Pamuji, T. N. H. (2008). Analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia (tahun 1993-2007) (Doctoral dissertation). Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Pendekatan ECM. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 163–169.
- Perlambang, H. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar terhadap Tingkat Inflasi. *Media Ekonomi*, 19(2), 49-68.
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Purwiyanto (2013). *Dasar-Dasar Praktik Penyusunan APBN di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Putra, G. N. A., & Sutrisna, I. K. (2017). Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(11), 2165–2194.

- Putri, F. D., & Jamal, S. W. (2020). Analisis *Bi Rate* dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Volume Perdagangan Saham Di Bursa Efek Indonesia (2016-2018). *Borneo Student Research (BSR)*, 1(2), 1147–1154.
- Putri Yeni, dkk, “Pengaruh Suku Bunga, Loan to Deposito Ratio (LDR) dan Pertumbuhan Kredit Terhadap Inflasi di Indonesia,” *EcoGen* Vol. 1, No. 3, (September 2018)
- Rahayu, N. D., Sasmito, B., & Bashit, N. (2018). Analisis Pengaruh Fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Terhadap Curah Hujan Di Pulau Jawa. *Jurnal Geodesi Undip* Vol. 7 No. 1, 2337-845X.
- Rahmawati. (2011). Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Inflasi Di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 9(1), 117–188.
- Rahmawati, D. A. D. (2017). Analisis Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2006.1 - 2015.12 (Pendekatan Error Correction Model). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 240–254.
- Rompas, W. F. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Permintaan Kredit Pada Perbankan Di Kota Manado. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 18, Issue 02).
- Ryan Filbert, *Investor Blueprint*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2016), hal. 34
- Sadono Sukirno. (2013). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 15
- Sari, S. P., & Nurjannah, S. (2023). Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar dan BI Rate Terhadap Inflasi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Daya Beli Masyarakat. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 21-29.
- Salvatore, Dominick. 2008. *Theory and Problem of Micro Economic Theory*. 3rdEdition. Alih Bahasa oleh Rudi Sitompul. Penebit Erlangga. Jakarta.
- Senen, A. S., Kumaat, R. J., & Mandeij, D. (2020). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Dan Cadangan Devisa

Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2008:Q1-2018:Q4.  
*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 12–22

Simarmata, Djamester. (2007). *Fiscal Sustainability in Indonesia*. Indonesian Economic Journal, ISSN 0854-1507

Sipayung, P.T.E., & Budhi, M.K.S. (2012). Pengaruh PDB, Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 1993-2012. *E Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(7), 334–343.

Siswanto, S. (2024). Dampak Pengeluaran Pemerintah Dan Pembayaran Non-Tunai Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 17(1), 98-118.

Solikin dan Suseno (2002). Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian. Buku Seri Kebanksentralan No. 1, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia.

Sriwahyuni, A., Nainggolan, P., & Sinurat, A. (2020). Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Sumatera Utara : *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 64.

Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susetyo, Didik; Reformasi Kebijakan Fiskal: Pengaruh Defisit Anggaran terhadap *Penumbuhan* Ekonomi; *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3 No.1 Februari 2001 ; BPF E Unsri

Susmiati, Giri, N. P. R., & Senimantara, N. (2021). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2018. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4(2), 69.

Utami, A. T., & Soebagiyo, D. (2013). Penentu Inflasi Di Indonesia; Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar Ataukah Cadangan Devisa? *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 144–152.

Warkawani, C. M., Chrispur, N., & Widiawati, D. (2020). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2008-2017. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(1), 18.

Yanti, Y. W. T. F., & Soebagy, D. (2022). Analisis pengaruh jup, suku bunga, dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia tahun 2005-2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 249-264.

Yodiatmaja, Banu. 2012. "Hubungan Antara BI Rate Dan Inflasi Periode Juli 2005 – Desember 2011 : Uji Kausalitas Toda–Yamamoto". Universitas Negeri Semarang. Indonesia

Yosephina, R. M., & Murtala. (2019). Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 2(2), 90.